



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN



FORUM
PENGADA LAYANAN
BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Laporan

BASIS DATA SINERGI

Periode Data Januari – Desember 2023

Jakarta, 12 Agustus 2024

Tentang BASIS DATA SINERGI

Basis Data Sinergi adalah Basis Data yang bersumber dari 3 lembaga yaitu:

❑ **Simfoni PPA**

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak),

❑ **Sintas Puan**

(Komnas Perempuan),

❑ **Titian Perempuan**

(Forum Pengada Layanan/FPL)

Kolaborasi bertujuan menguak fenomena gunung es kekerasan terhadap perempuan.

Kolaborasi 3 Lembaga untuk Sinergi basis data dimulai sejak tahun 2020.

JENIS DATA

- Korban
- Kasus
- Karakteristik Korban
- Ranah Kekerasan
- Hubungan Korban & Pelaku
- Karakteristik Pelaku
- Jenis Kekerasan
- Bentuk Layanan

KETERBATASAN DATA

- Terjadi *Double Counting*
- Tiap Lembaga memiliki karakteristik berbeda
- Data berbasis korban, bukan kasus

BASIS DATA

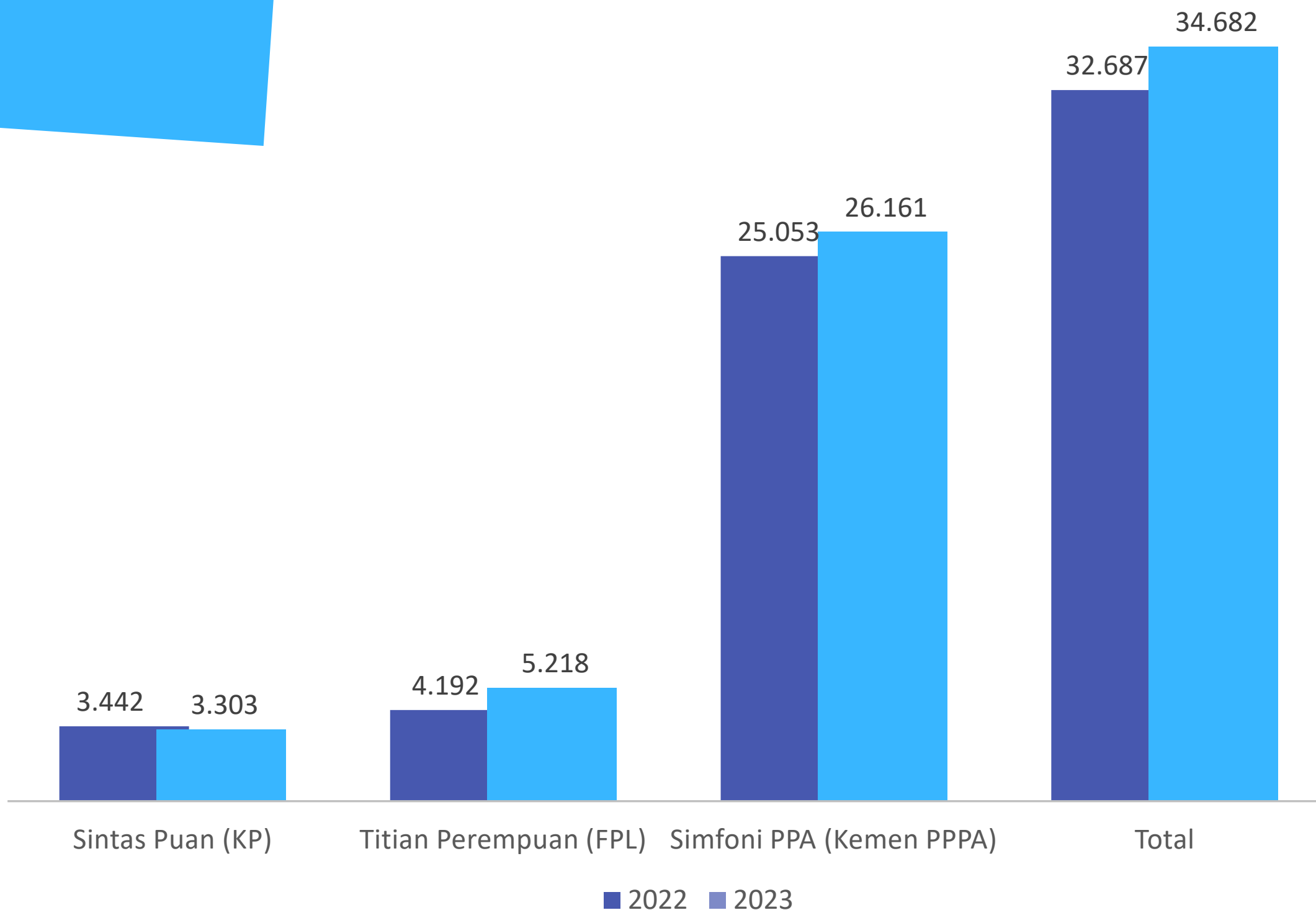
Tanggal Penginputan

PERIODE DATA

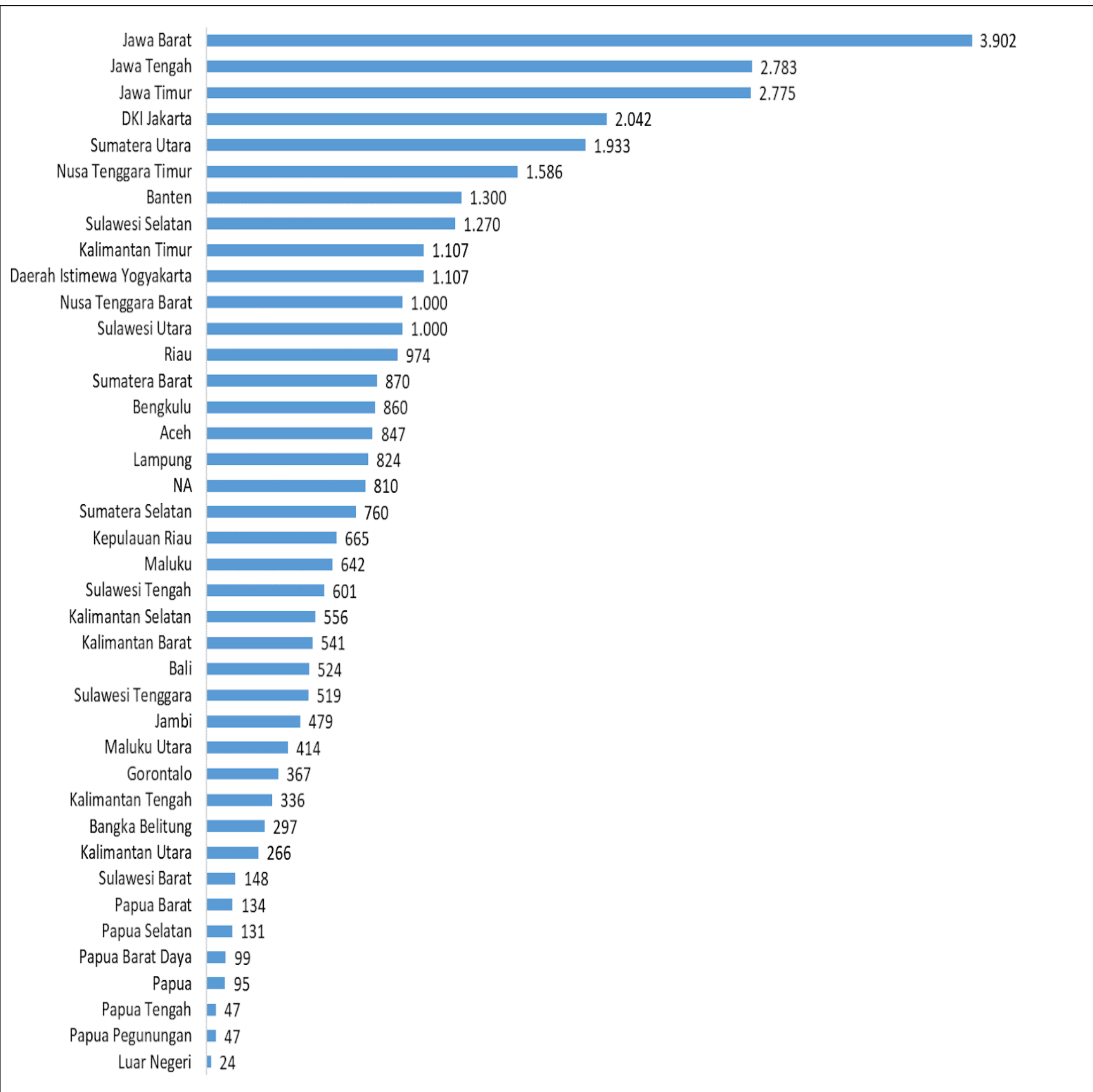
Januari – Desember 2023

TREN JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MELAPOR MENURUT KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Tahun 2022 & 2023



- **Peningkatan perempuan korban kekerasan yang melapor** terdapat pada Simfoni Kemen PPPA & Titian Perempuan FPL.
- Meningkatnya jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor dapat dimaknai sebagai peningkatan kesadaran di masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan.



Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang Melapor Menurut Provinsi dan Kementerian/Lembaga

3 Provinsi Tertinggi



Jawa Barat → 3.902

Jawa Tengah → 2.783

Jawa Timur → 2.775



Akses layanan dan organisasi sipil pengada layanan paling banyak

Infrastruktur yang memudahkan untuk melapor (jalan raya, kendaraan, jaringan internet, dan Listrik)

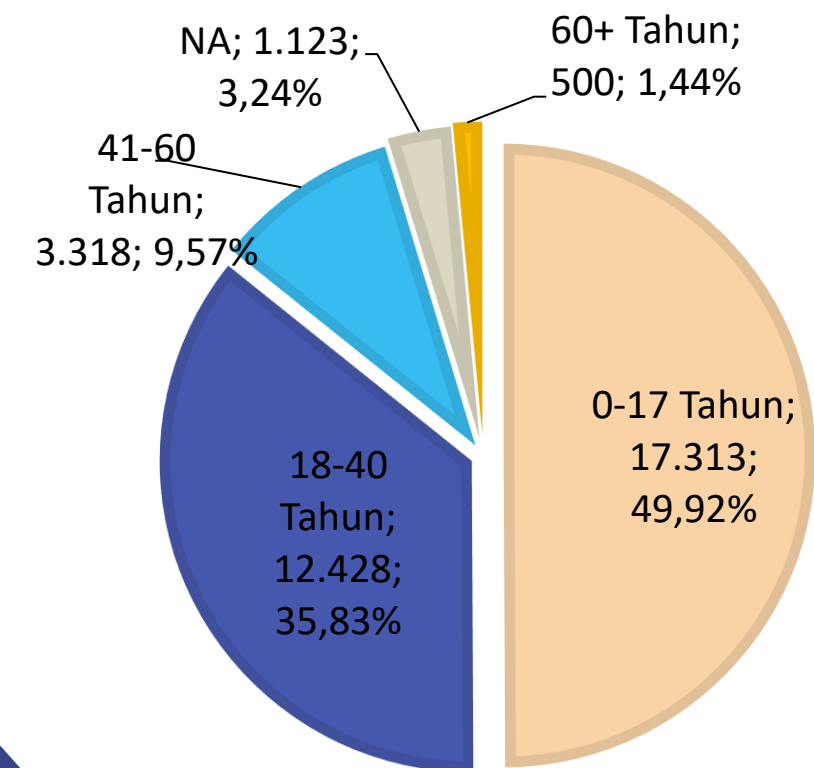
Sumber : (Data Gabungan Simfoni PPA, Sintas Puan, dan Titian Perempuan)

ANALISIS KASUS

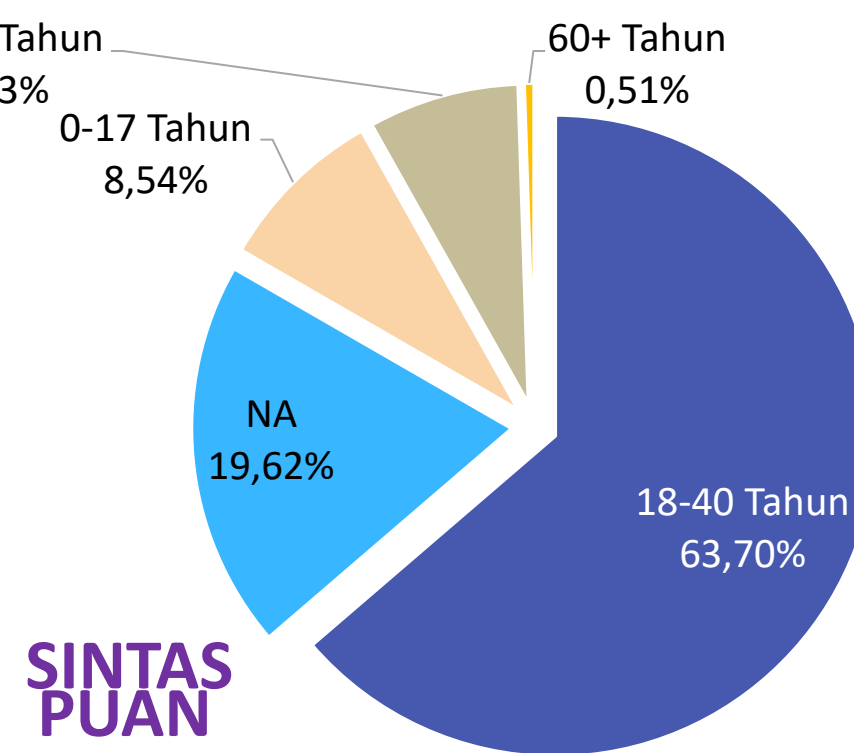
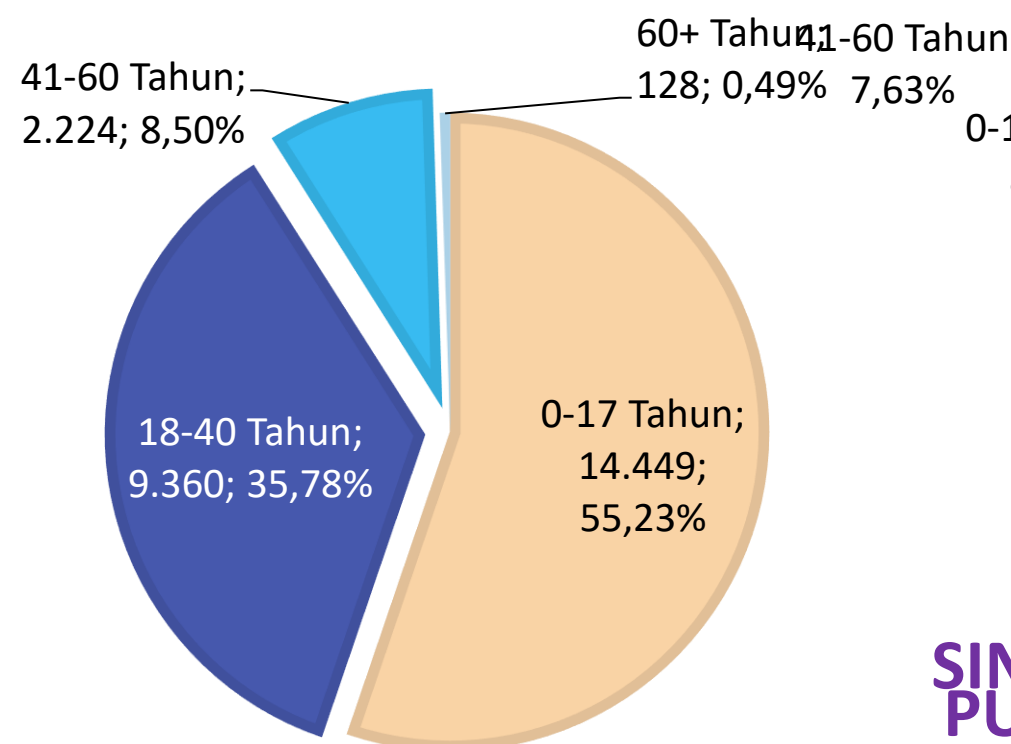
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

- Karakteristik Korban
 - Ranah Kekerasan
 - Jenis Kekerasan
 - Karakteristik Pelaku
 - Bentuk Pelayanan
-

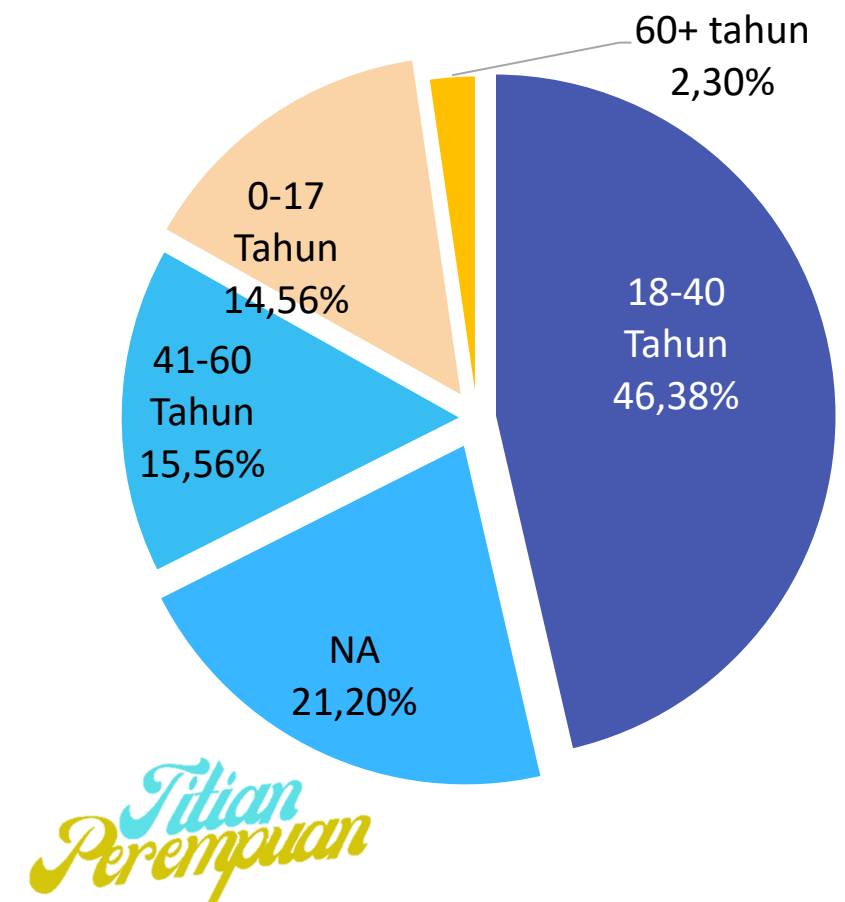
PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN menurut KELOMPOK UMUR



Sumber: Data Gabungan Simfoni PPA, Titian Perempuan dan Sintas Puan



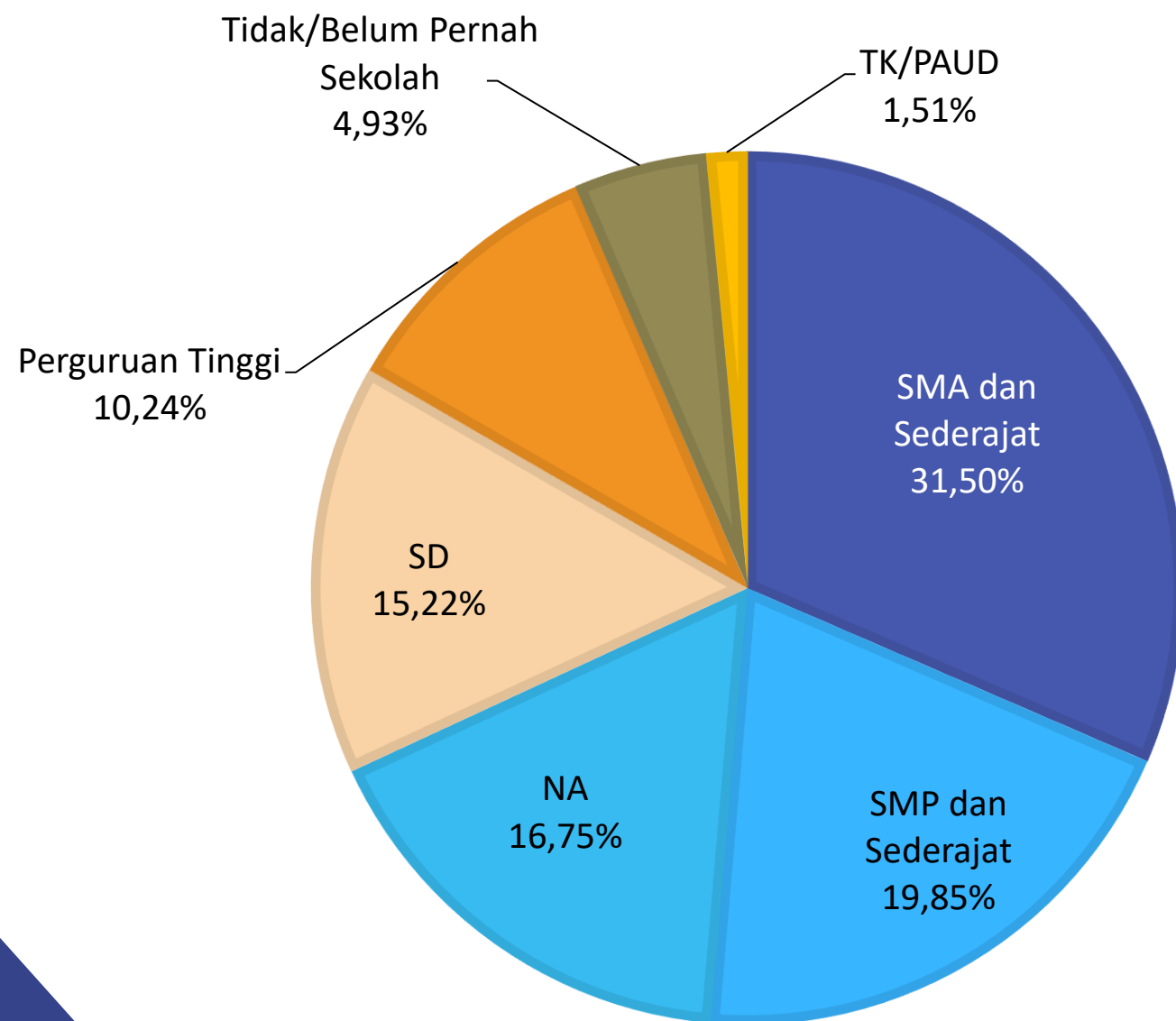
SINTAS PUAN



Titian Perempuan

Dalam Simfoni-PPA korban terbanyak pada **usia anak (0-17 tahun)**, sedangkan pada Sintas Puan dan Titian Perempuan korban terbanyak pada **usia dewasa (18-40 tahun)**

PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN *menurut* TINGKAT PENDIDIKAN



Sumber: Data Gabungan Simfoni PPA, Sintas Puan, dan Titian Perempuan.

TK/PAUD s.d Tingkat Perguruan Tinggi

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada semua Tingkat pendidikan

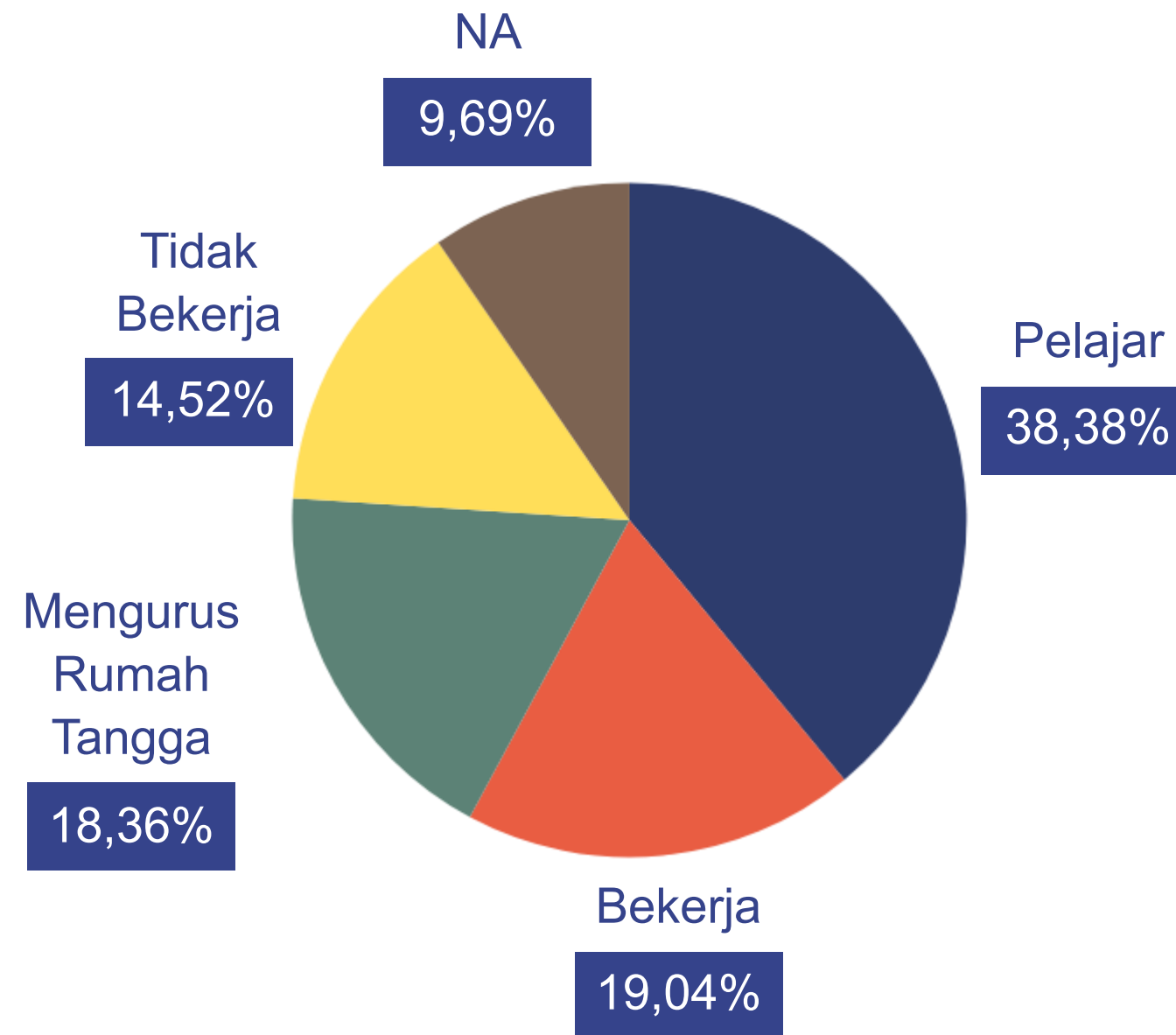
SMA dan Sederajat

Tingkat Pendidikan Terakhir terbanyak

PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

menurut

KEGIATAN UTAMA

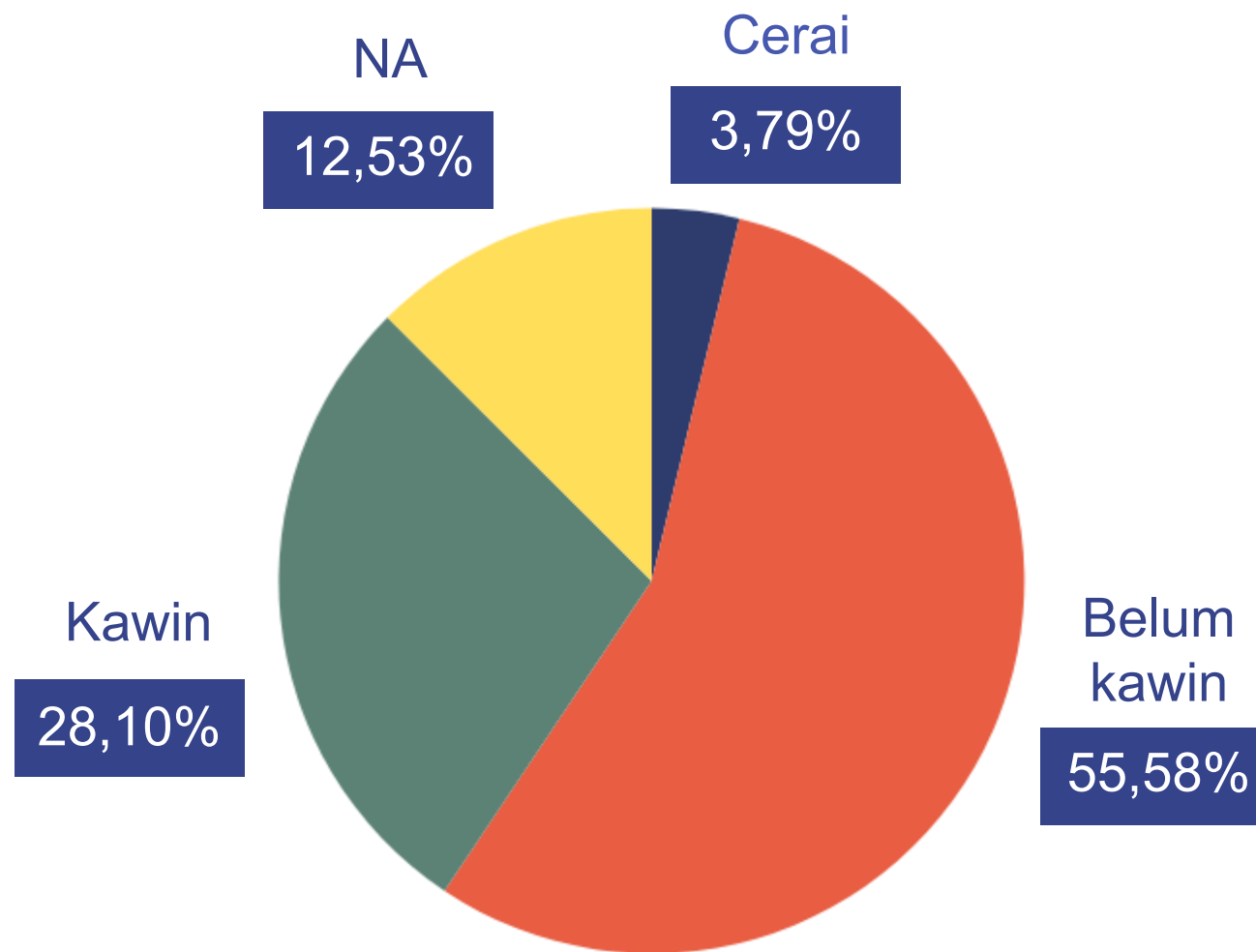


Data Gabungan : Simfoni PPA,
SintasPuan, Titian Perempuan

- Perempuan rentan menjadi korban kekerasan terlepas apapun aktivitas utamanya
- Aktivitas Utama sebagai pelajar tertinggi diikuti oleh Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga

PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

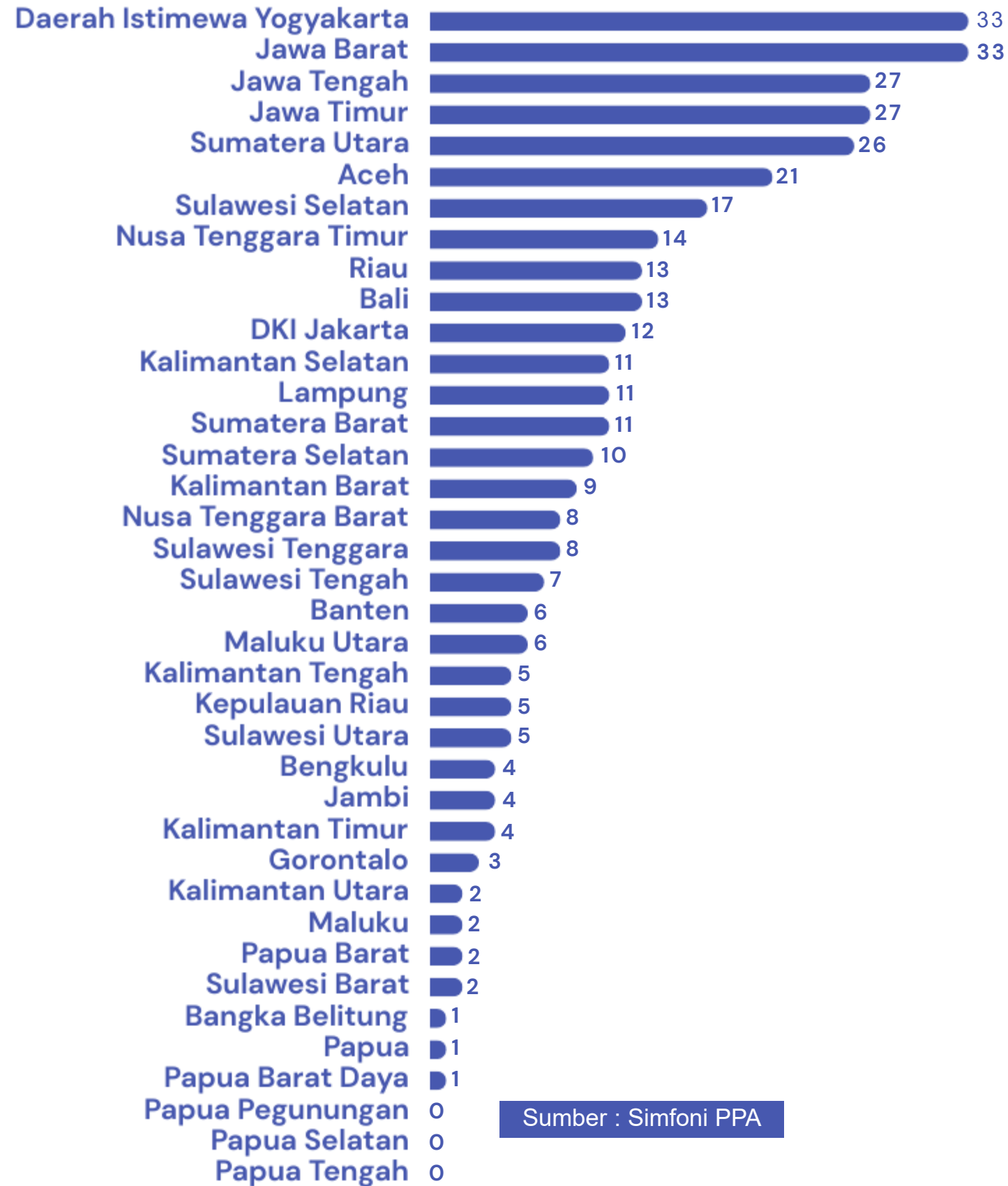
menurut STATUS PERKAWINAN



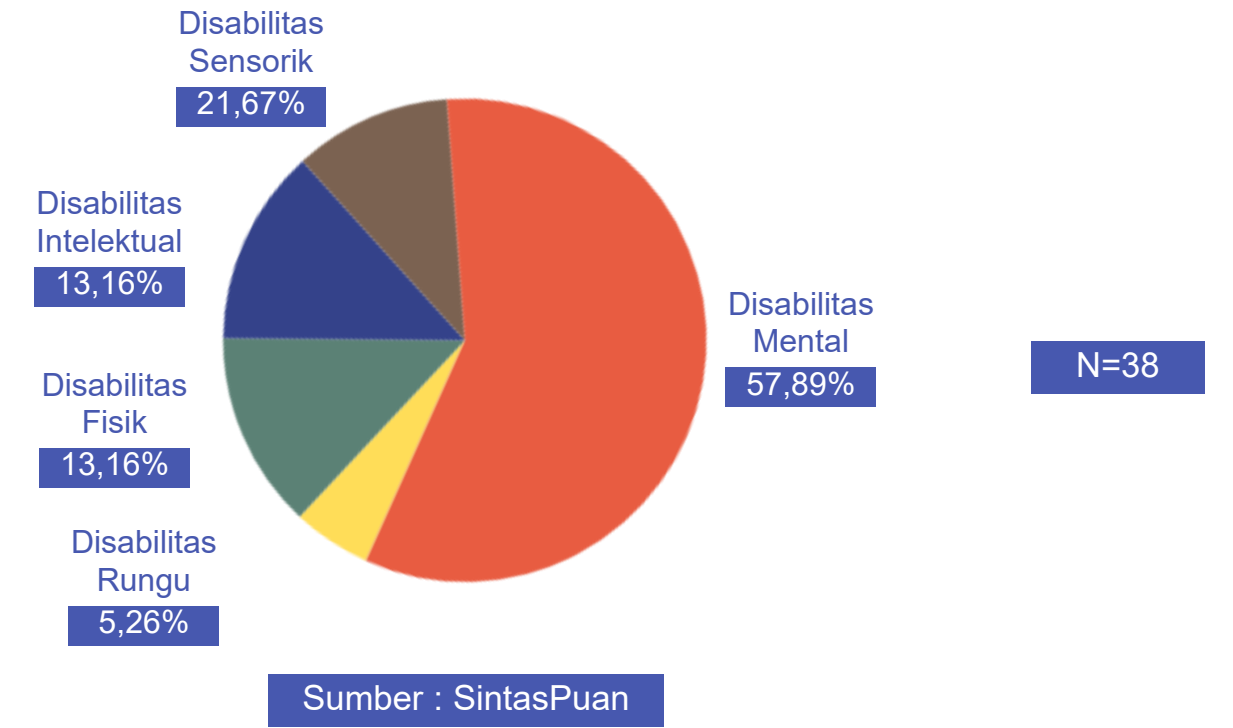
Data Gabungan : Simfoni PPA,
SintasPuan, Titian Perempuan

- Data **NA** sebesar **12,53%** bisa disebabkan korban enggan memberikan informasi data pribadi
- Perempuan korban kekerasan dengan status belum kawin menjadi kelompok tertinggi
- Status kawin dalam pencatatan di SintasPuan dan FPL mencakup kawin yang tercatat maupun tidak tercatat

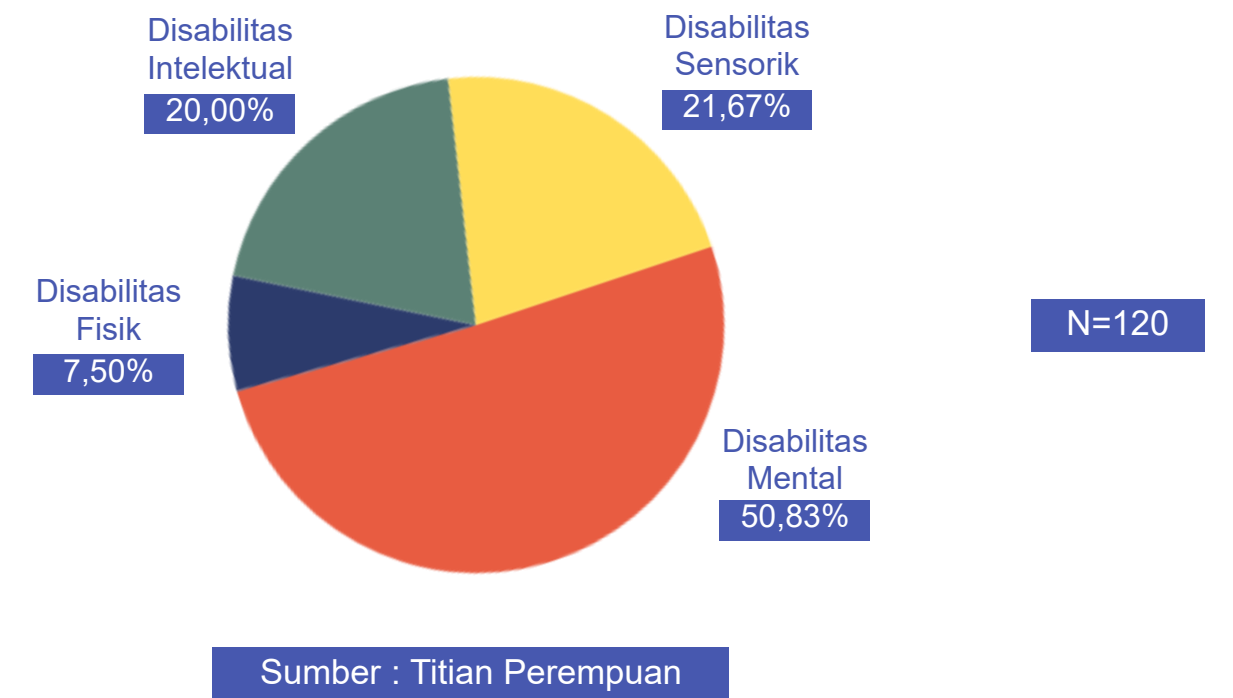
Perempuan Korban Kekerasan menurut Status Disabilitas



Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Status Disabilitas

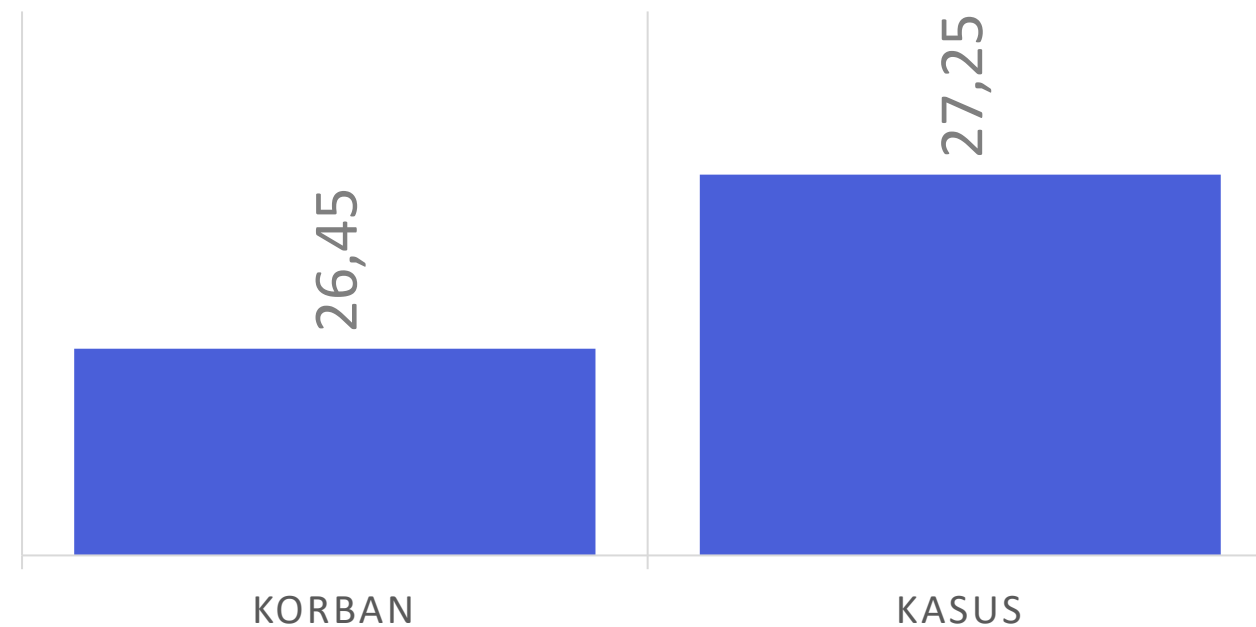


Persentase Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Status Disabilitas

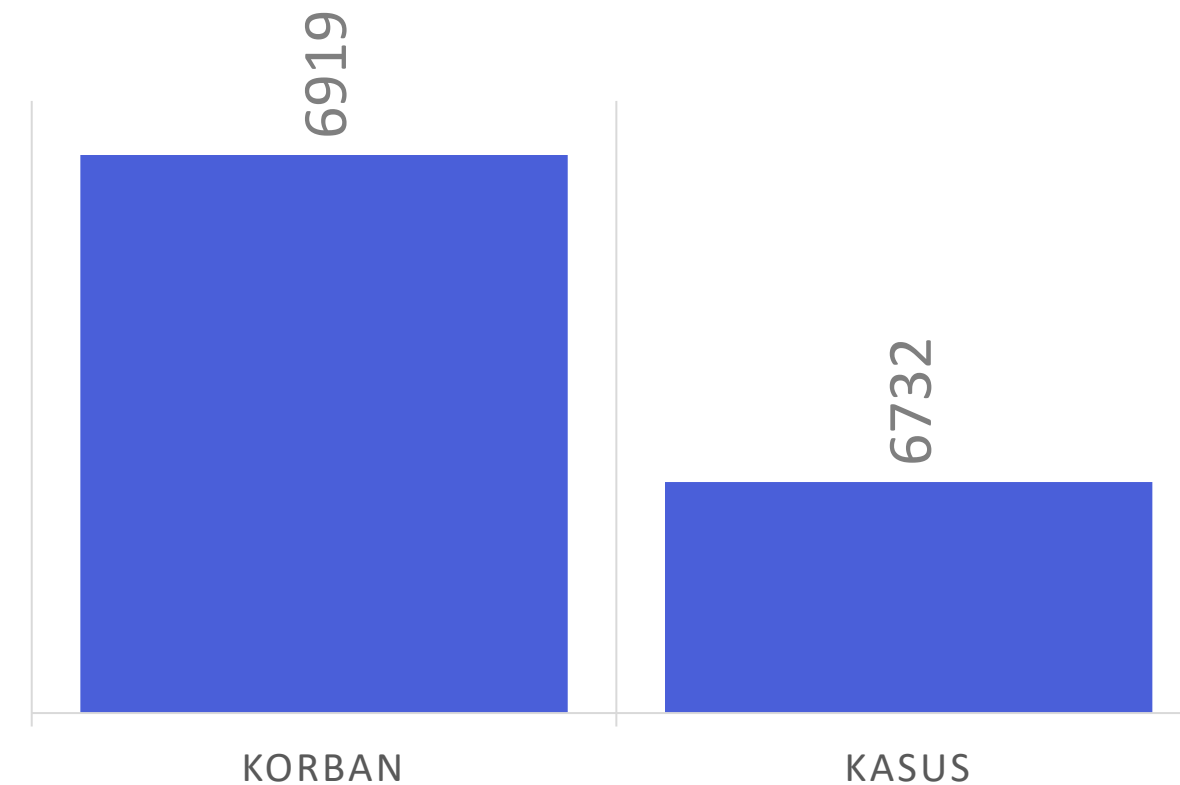


Ranah Kekerasan

Persentase Perempuan Korban KDRT
Periode Januari-Desember 2023



Jumlah Perempuan Korban KDRT
Periode Januari-Desember 2023



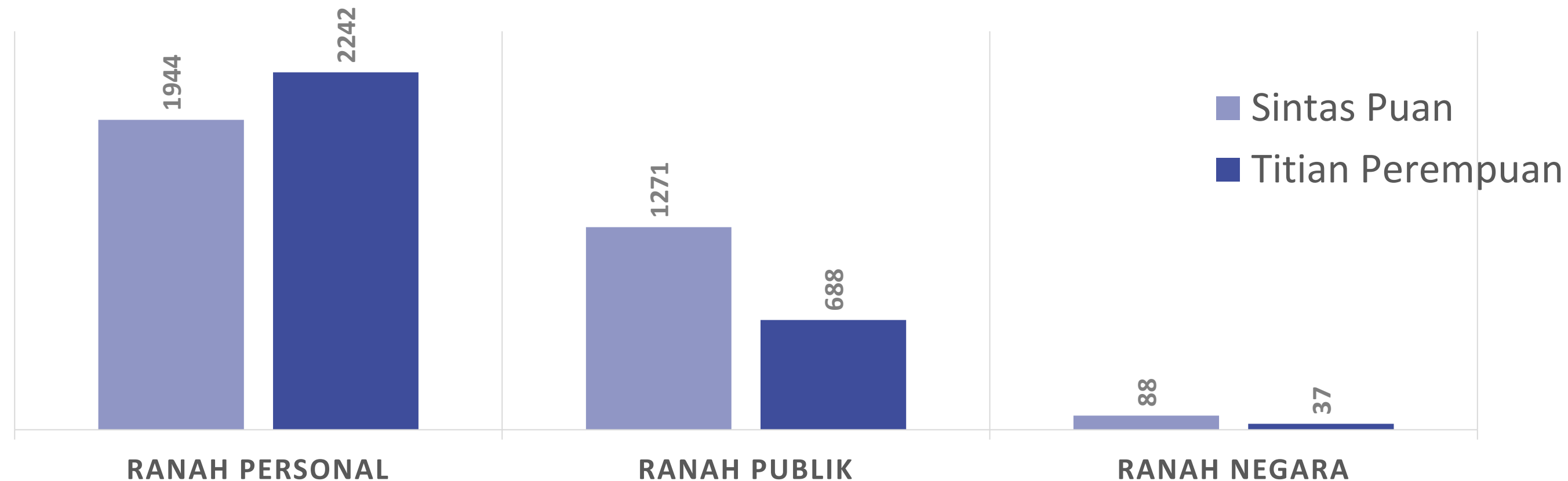
Sumber: Simfoni PPA

Faktor-faktor penyebab KDRT antara lain:

- Kondisi psikologis yang buruk;
- tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga;
- budaya tertentu yang dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai solusi;
- rendahnya pengendalian diri; dan
- ketidaksetaraan gender dan pengalaman KDRT di masa lalu.



Jumlah Perempuan Korban Menurut Ranah Kekerasan Periode Januari-Desember 2023



- Menunjukkan kekerasan di ranah personal masih mendominasi sepanjang tahun 2023.
- Kekerasan di ranah personal biasanya terjadi karena adanya hubungan emosional antara pelaku dan korban serta relasi kuasa hegemonik yang menyebabkan para korban memiliki kesulitan untuk keluar dari kekerasan yang terjadi.
- Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik meliputi semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang terjadi di wilayah tempat tinggal, dunia kerja, tempat umum, lingkungan pendidikan, terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan perdagangan orang serta kekerasan terhadap buruh migran.
- Kekerasan di ranah negara tersebut umumnya terjadi karena penggunaan alat-alat negara secara berlebihan yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dan berakibat pada kekerasan terhadap perempuan.

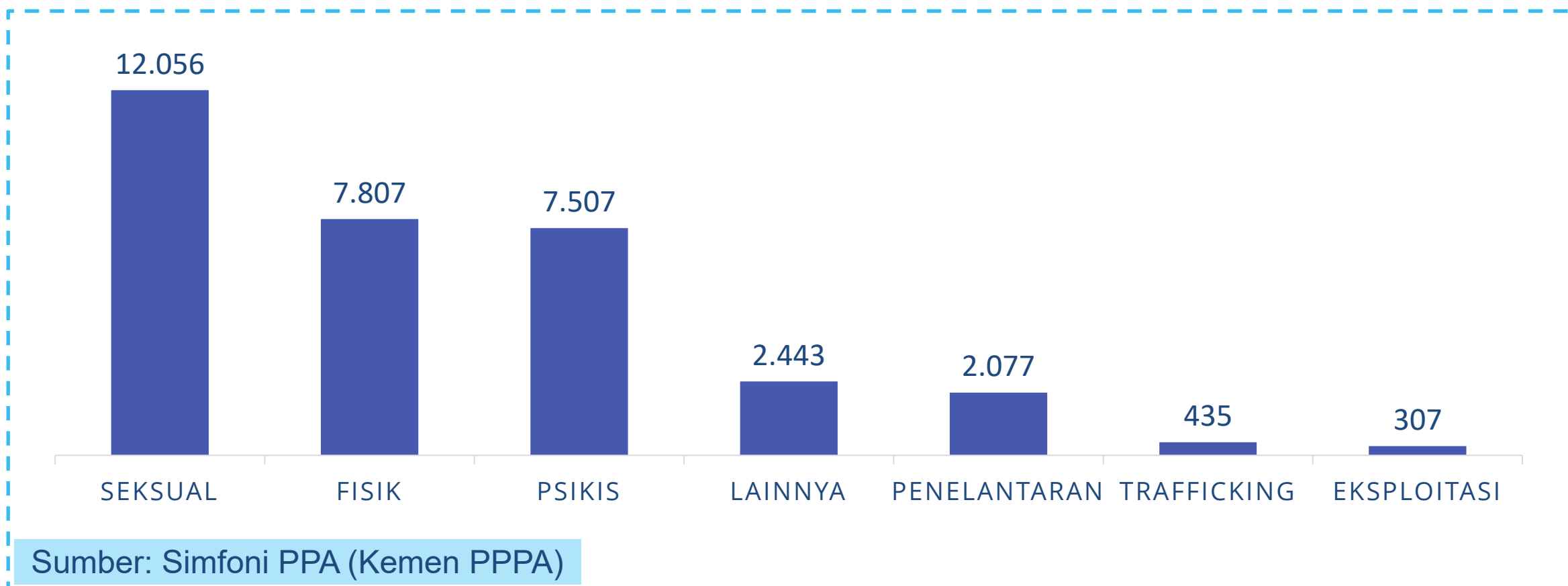


Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Periode Januari-Desember 2023



Kekerasan terhadap perempuan sangat berpotensi merugikan perempuan dalam berbagai aspek. Terlebih, dalam banyak kasus, perempuan korban cenderung mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.

Membuat perempuan korban semakin rentan & tidak berdaya karena mengalami kekerasan yang sistemis & berlapis.



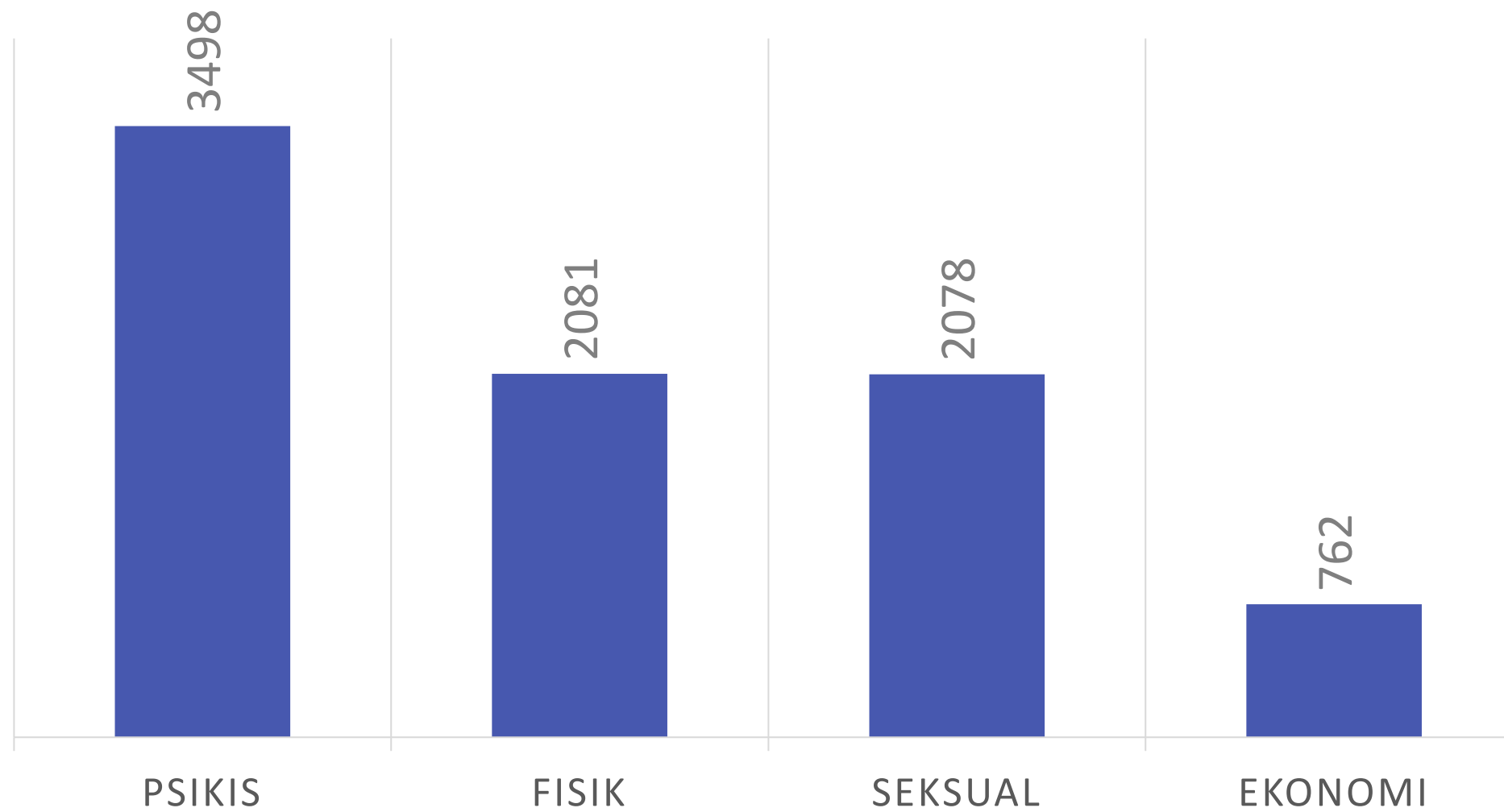
3 Jenis kekerasan tertinggi:

- kekerasan seksual** → 12.056 korban
- kekerasan fisik** → 7.807 korban
- kekerasan psikis** → 7.507 korban

Korban mungkin mengalami kekerasan lebih dari satu jenis

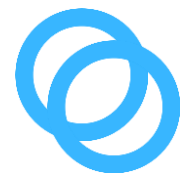


Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Periode Januari-Desember 2023

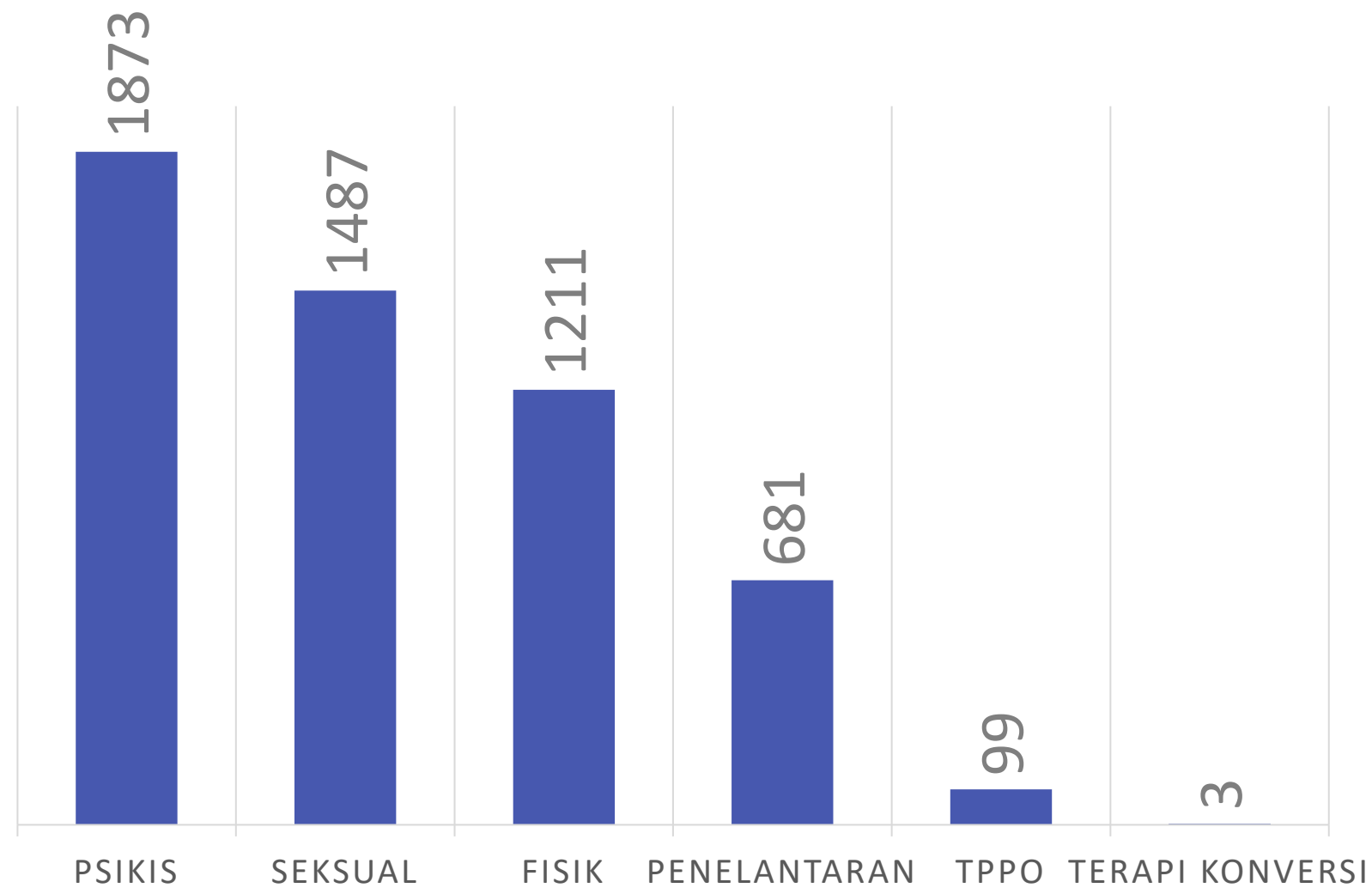


■ Sumber: Sintas Puan (KP)

- Sepanjang 2023, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan, kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak diadukan yakni sebanyak 3.498 kasus.
- Kekerasan fisik dan seksual memiliki jumlah yang hampir sama, yakni masing-masing 2.081 kasus dan 2.078 kasus.
- Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 762 kasus kekerasan sebagai kekerasan ekonomi.



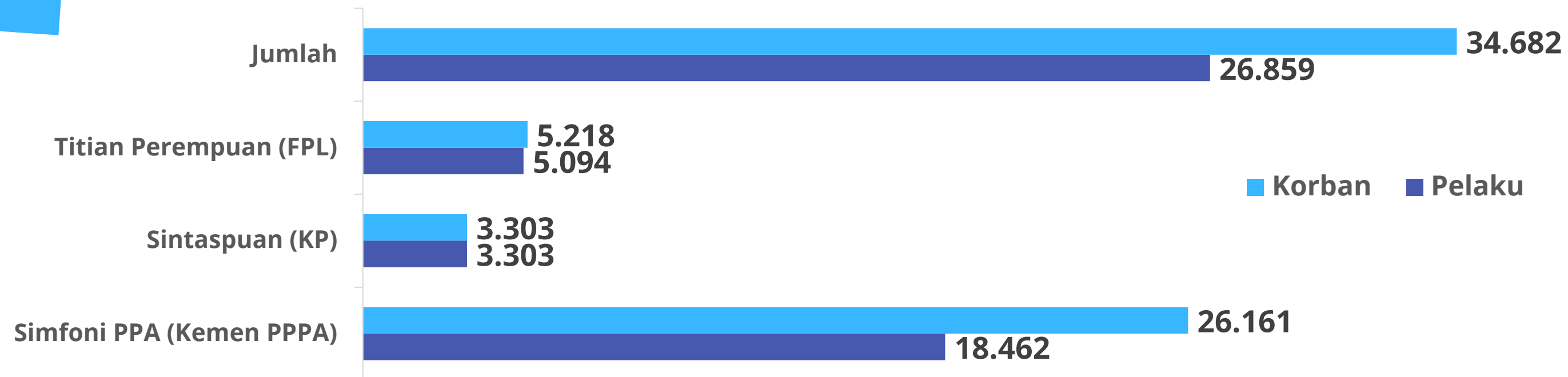
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan Periode Januari-Desember 2023



■ Sumber: Titian Perempuan (FPL)

- 3 Jenis Kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis yaitu sebanyak 1.873 korban, kekerasan seksual sebanyak 1.487 korban, dan kekerasan fisik sebanyak 1.211 korban.
- Korban yang mengalami kekerasan psikis masih sulit mendapatkan akses pemulihan yang mudah dan cepat (survei dari anggota forum pengada layanan, daerah sangat minim memiliki psikolog klinis yang mudah diakses layanan psikologis).

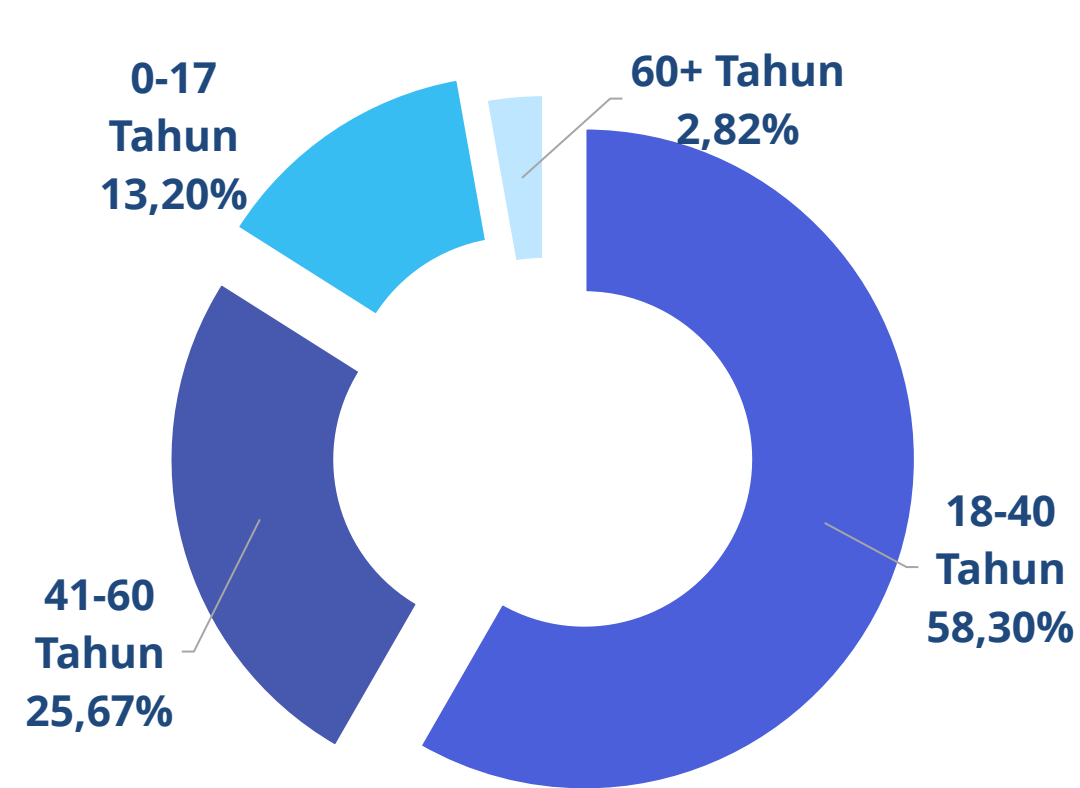
Jumlah Pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, Periode Januari-Desember 2023



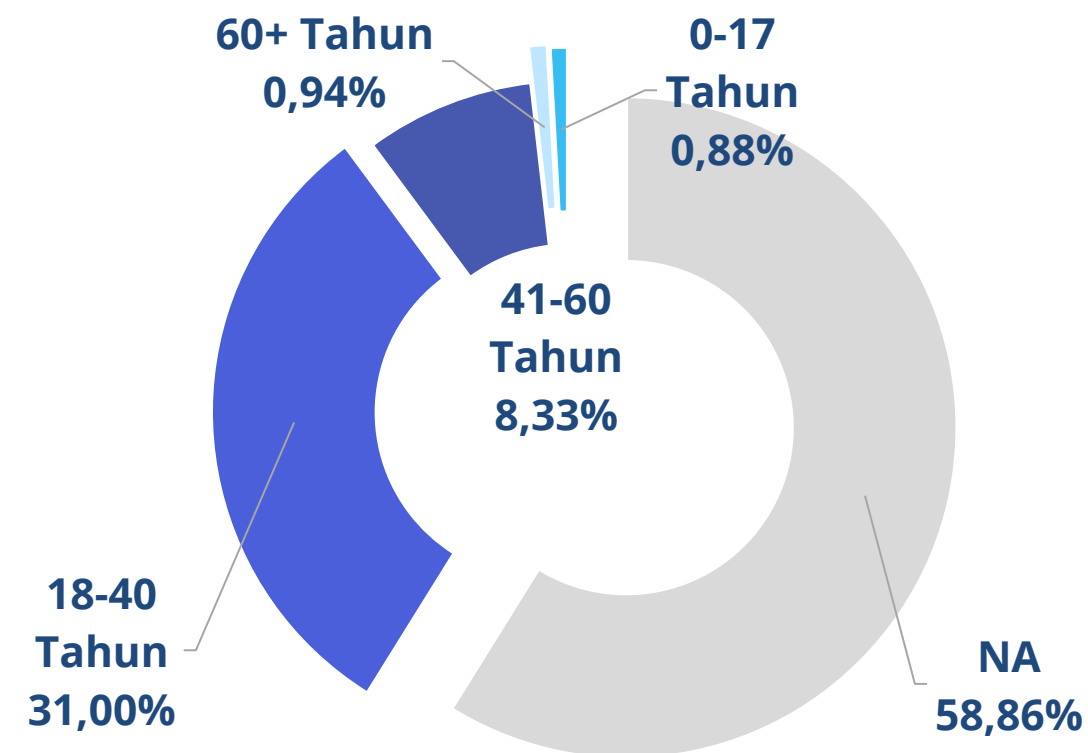
Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA), Sintas Puan, Titian Perempuan

- Jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 26.682 orang.
- Pada Simfoni PPA dan Titian Perempuan mencatat jumlah korban lebih banyak daripada jumlah pelaku.
Hal ini dapat diartikan sebagai berikut:
 1. Satu pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap beberapa korban, atau
 2. Terdapat data pelaku yang tidak tercatat dalam system basis data tersebut.
- Namun, Sintas Puan mencatat bahwa jumlah pelaku sama dengan jumlah perempuan korban kekerasan.

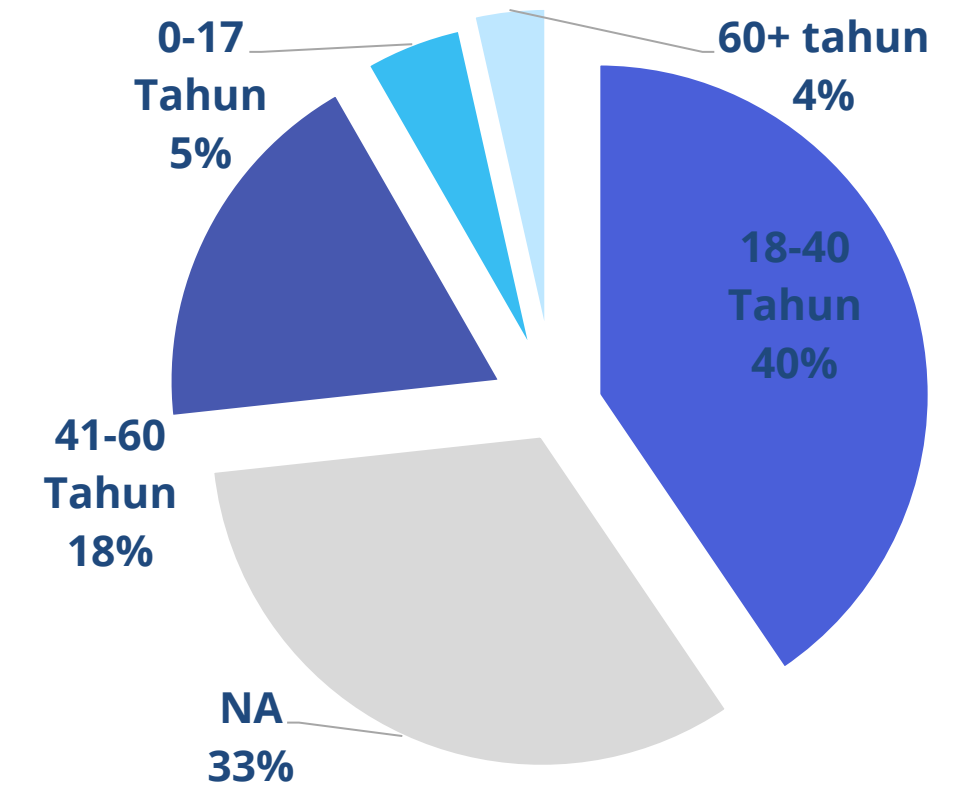
PERSENTASE PELAKU KEKERASAN MENURUT KELOMPOK UMUR PELAKU



Sumber: Simfoni PPA (Kemen PPPA)



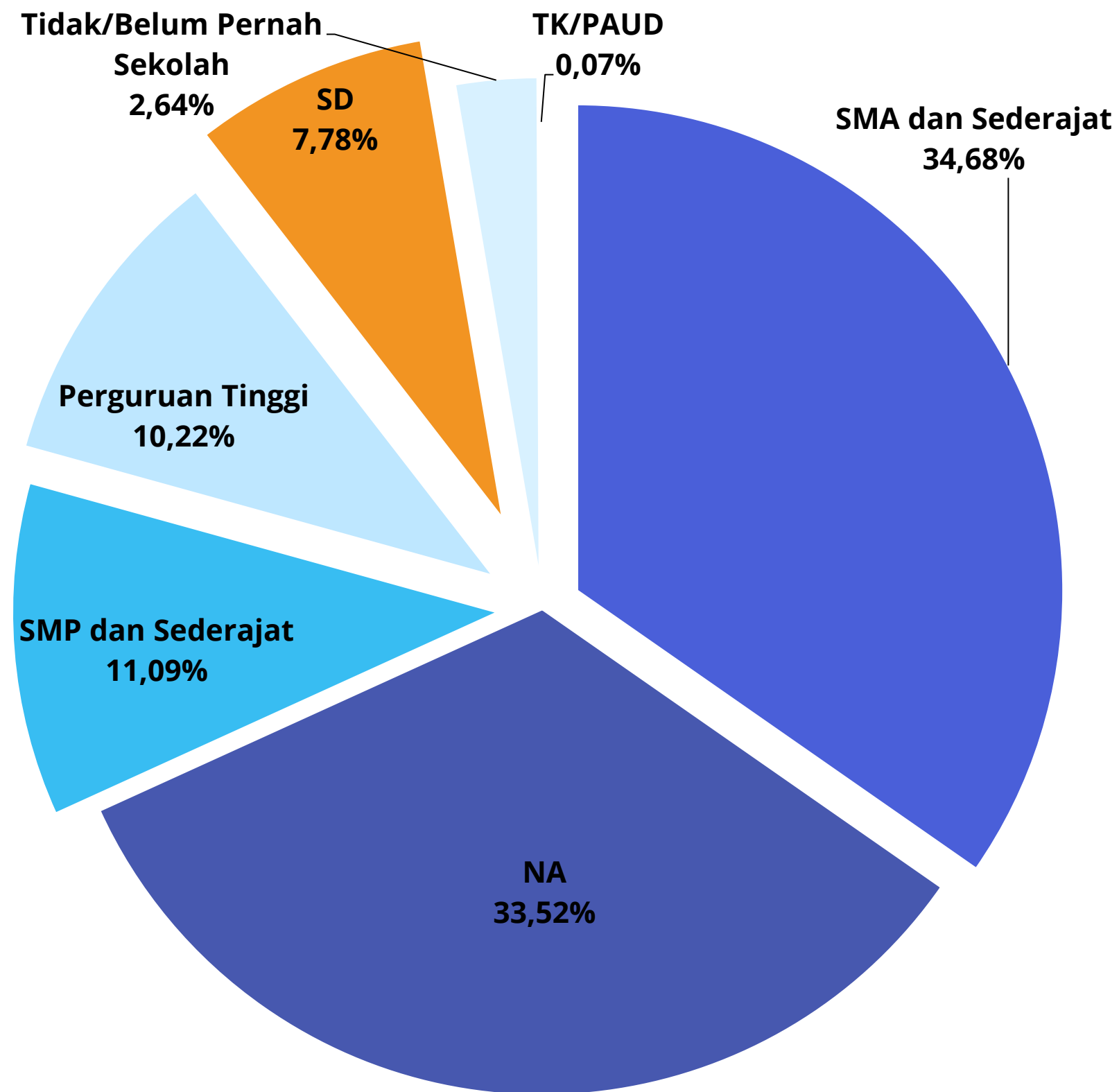
Sumber: Sintaspuan (KP)



Sumber: Titian Perempuan (FPL)

- Pelaku kekerasan pada semua kelompok umur.
- Pelaku kekerasan tertinggi adalah mereka pada kelompok umur 18-40 tahun.
- Banyaknya na (tidak tercatat) pada data pelaku.

PERSENTASE PELAKU KEKERASAN MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN, PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

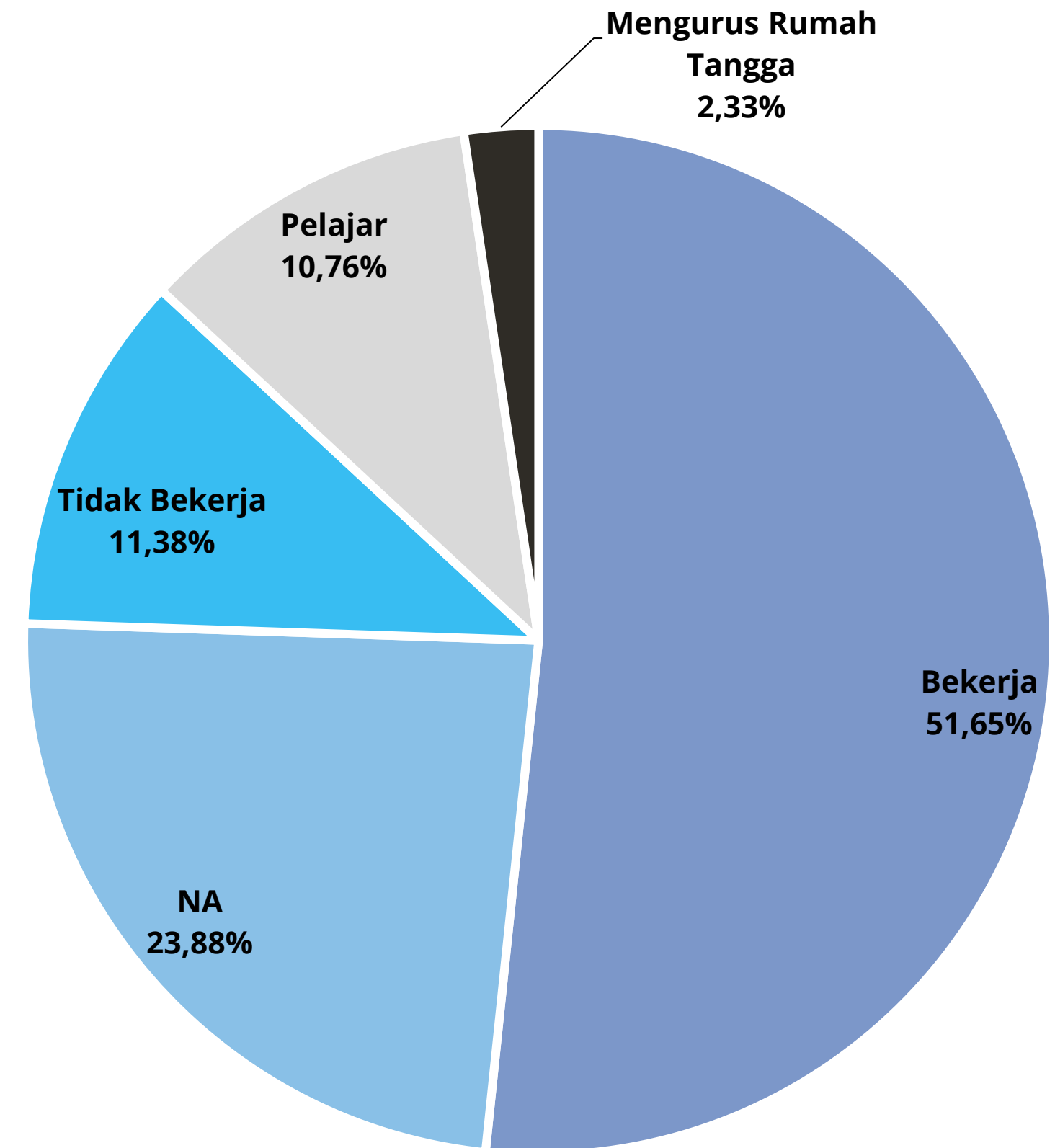


Data Gabungan: Simfoni PPA ,
Sintas Puan, Titian Perempuan

- Pelaku kekerasan ada di semua tingkat pendidikan, mulai dari tidak pernah bersekolah sampai perguruan tinggi.
- 10,22 persen pelaku kekerasan pada kelompok pendidikan perguruan tinggi. Tentunya kekerasan akan semakin langgeng terjadi jika para pelaku adalah orang-orang dengan latar belakang tingkat pendidikan yang cukup baik, apalagi jika para pelaku ini memiliki kekuasaan.
- 34,68 persen pelaku kekerasan pada kelompok pendidikan SMA dan sederajat.

PERSENTASE PELAKU KEKERASAN MENURUT KEGIATAN UTAMA, PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

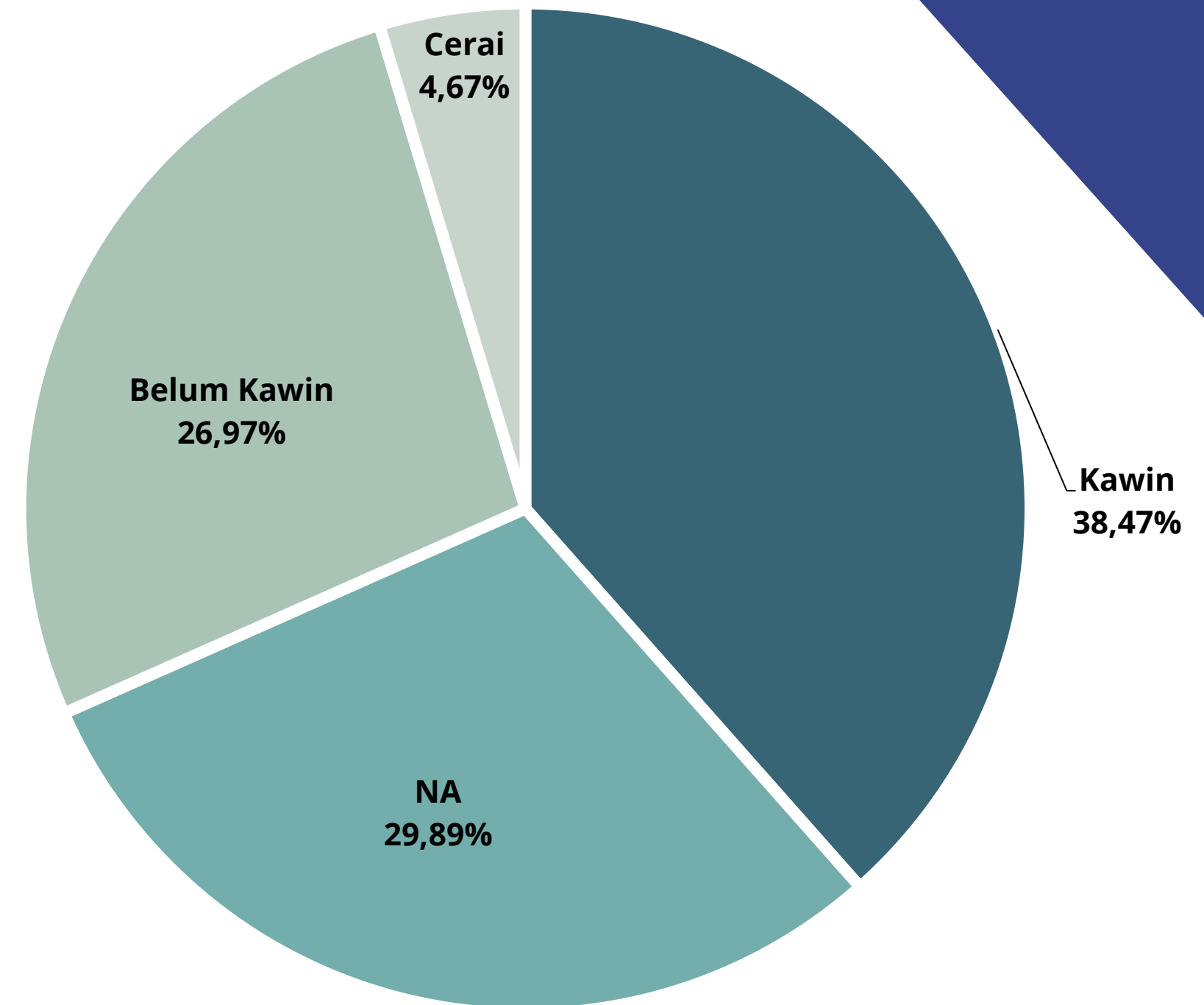
- Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama pelaku kekerasan paling tinggi adalah mereka yang bekerja, dimana tercatat pada data gabungan Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan sebanyak 51,65%.
- Kemungkinan menjadi pelaku kekerasan dari kelompok bekerja lebih besar dibandingkan kelompok tidak bekerja (pelajar, mengurus rumah tangga dan tidak bekerja).
- Hal ini dimungkinkan bahwa ketika bekerja maka mungkin memiliki perekonomian dan kekuasaan yang lebih baik.



Data Gabungan: Simfoni PPA ,
Sintas Puan, Titian Perempuan

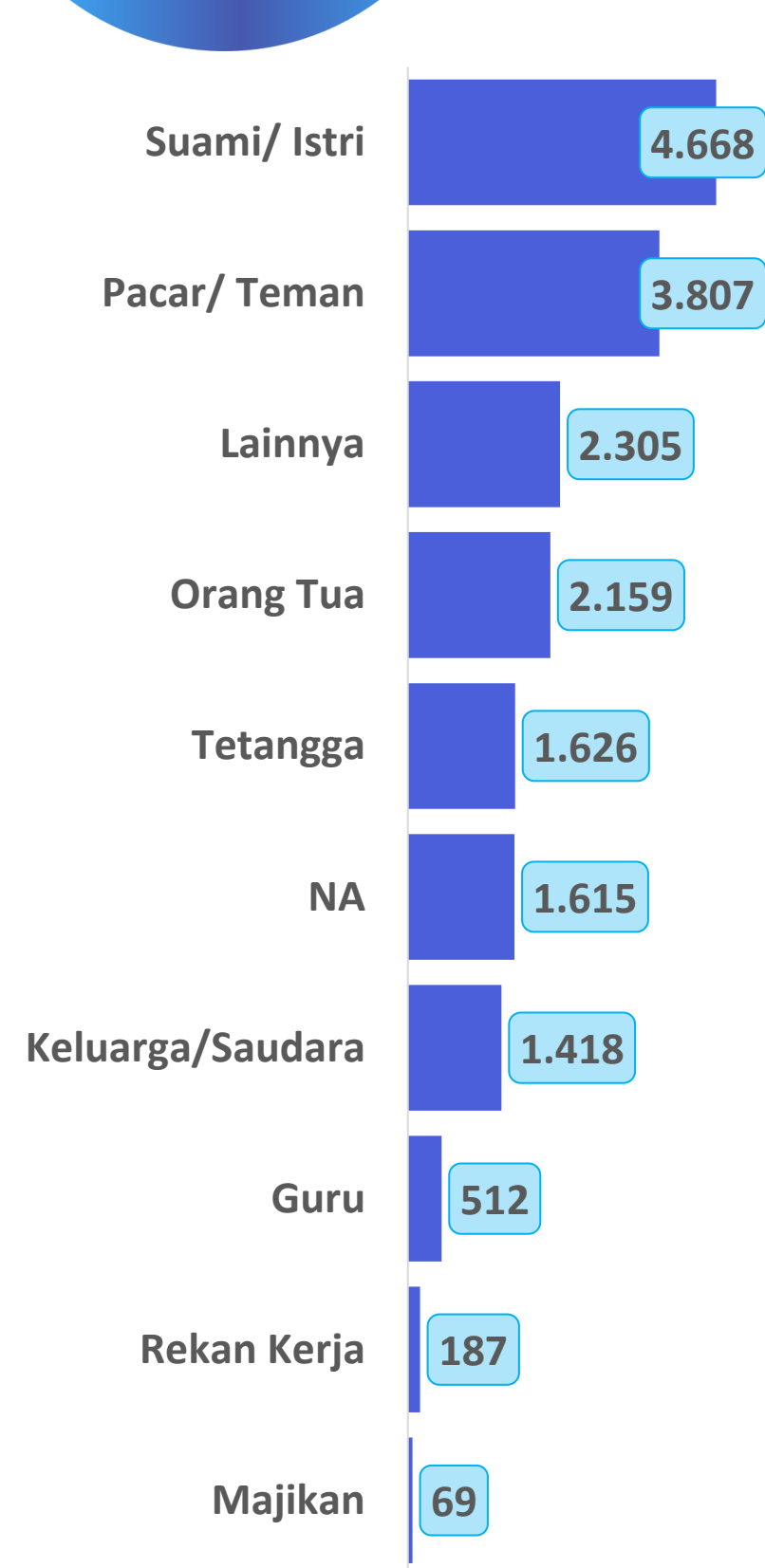
PERSENTASE PELAKU KEKERASAN MENURUT STATUS PERKAWINAN, PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023

- Status perkawinan pelaku yang melakukan kekerasan tertinggi adalah status kawin sebesar 38,47%.
- Bila pelaku laki-laki maka budaya patriaki yang terdapat di masyarakat dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku terutama pada yang berstatus kawin.

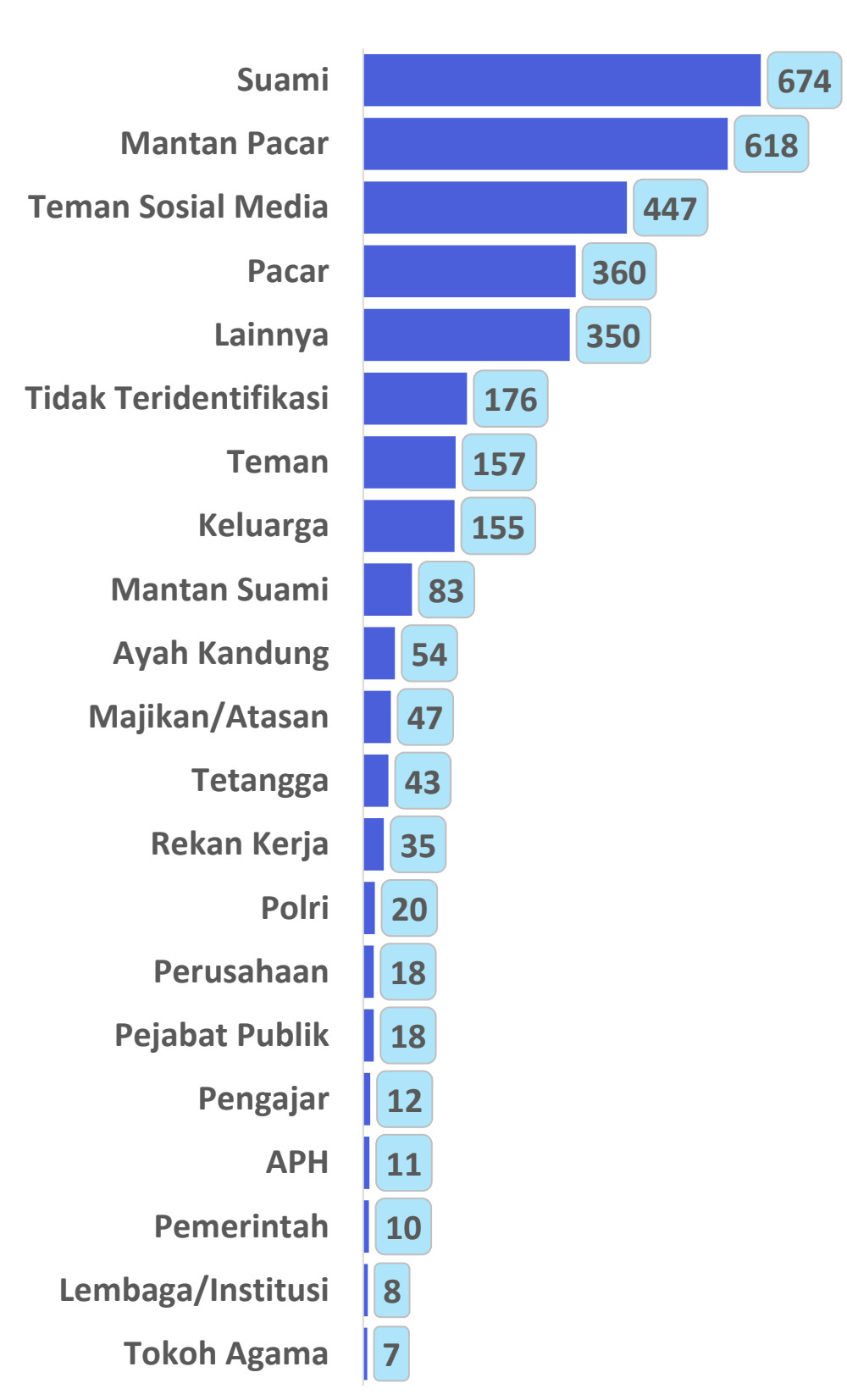


Data Gabungan: Simfoni PPA ,
Sintas Puan, Titian Perempuan

JUMLAH PELAKU KEKERASAN MENURUT HUBUNGAN PELAKU & KORBAN KEKERASAN, PERIODE JANUARI-DESEMBER 2023



Sumber : Simfoni PPA (KemenPPPA)



Sumber : Sintaspuan (KP)



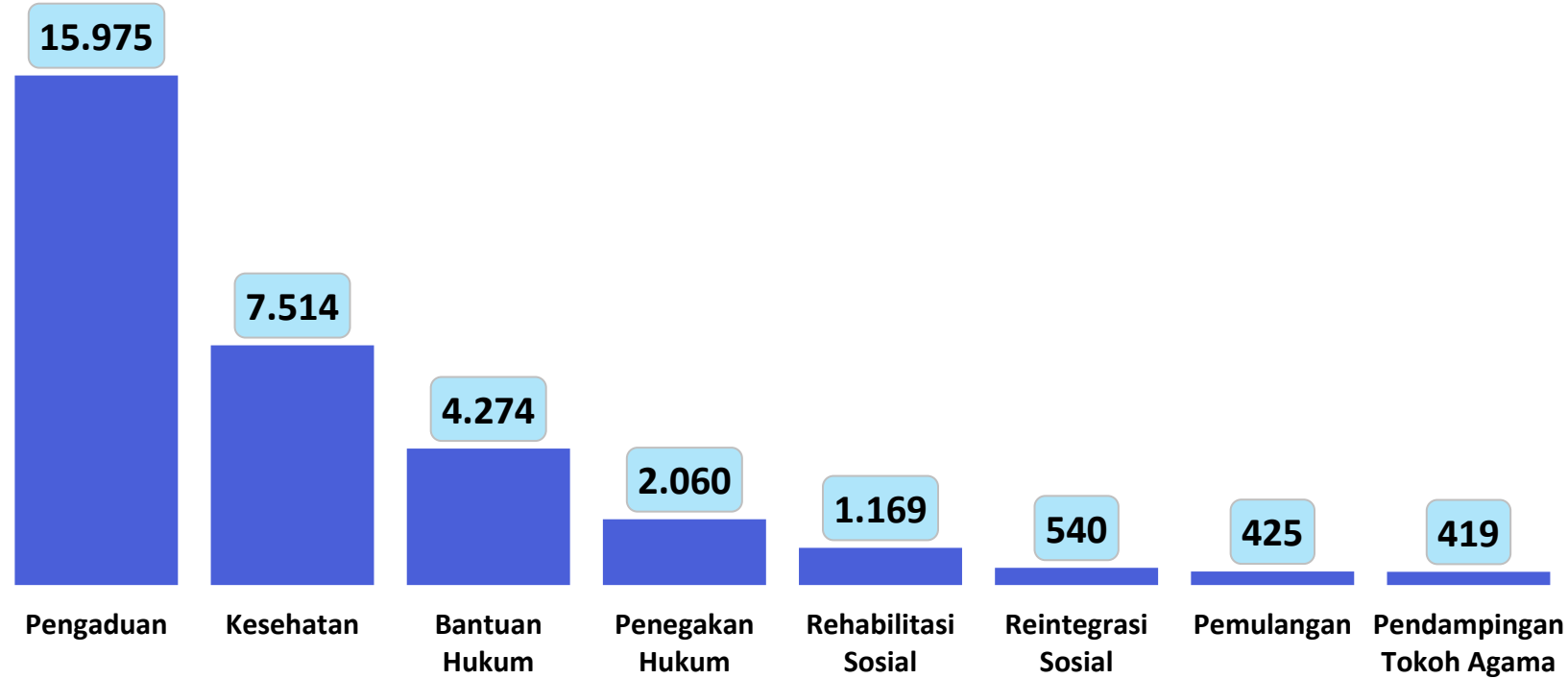
Sumber : Titian Perempuan (FPL)

Pelaku kekerasan tertinggi yaitu **SUAMI**, dimana pelaku merupakan orang terdekat korban.

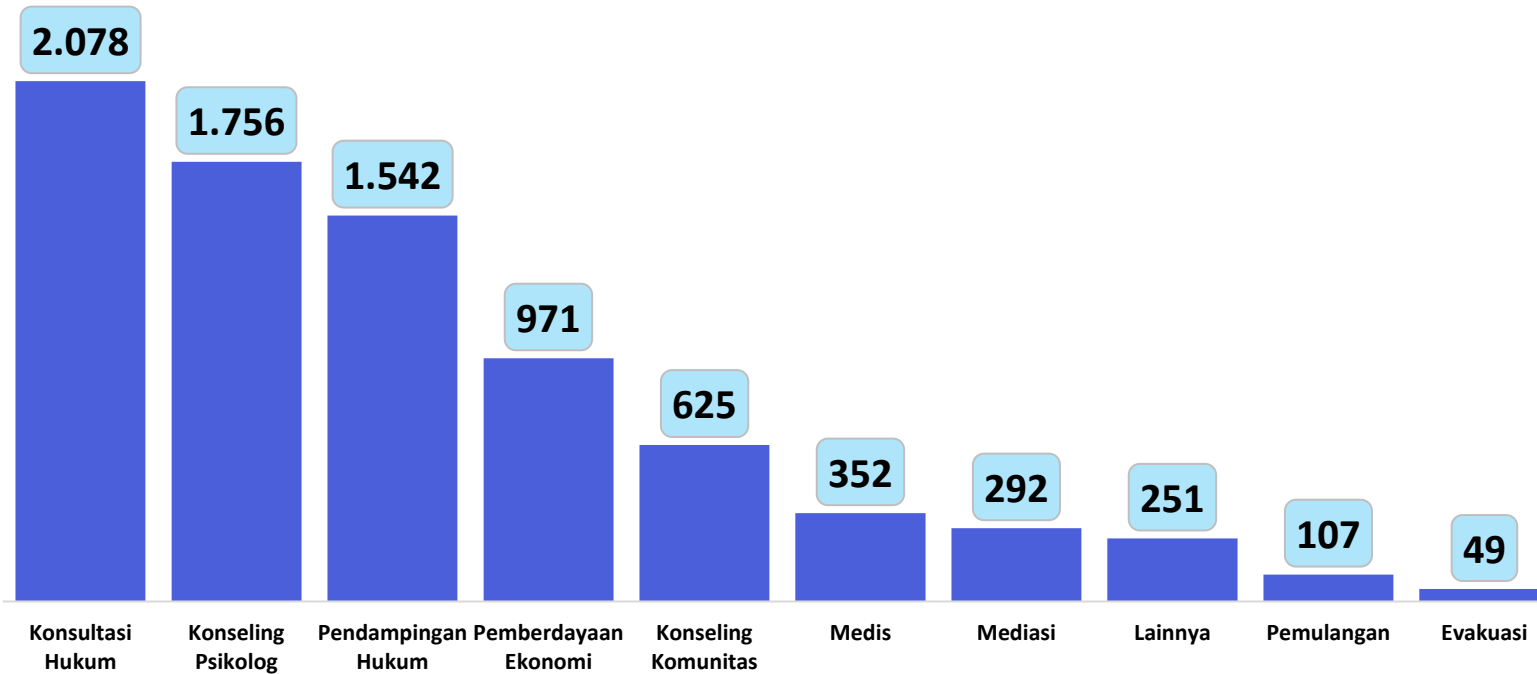
Berdasarkan hubungan pelaku dan korban, kekerasan terhadap Perempuan rentan terjadi dalam setiap relasi kehidupan, seperti

- relasi personal (suami/istri, orangtua, dll),
- relasi sosial (teman/pacar, tetangga, dll), bahkan
- relasi profesional (guru, rekan kerja, majikan, dll).

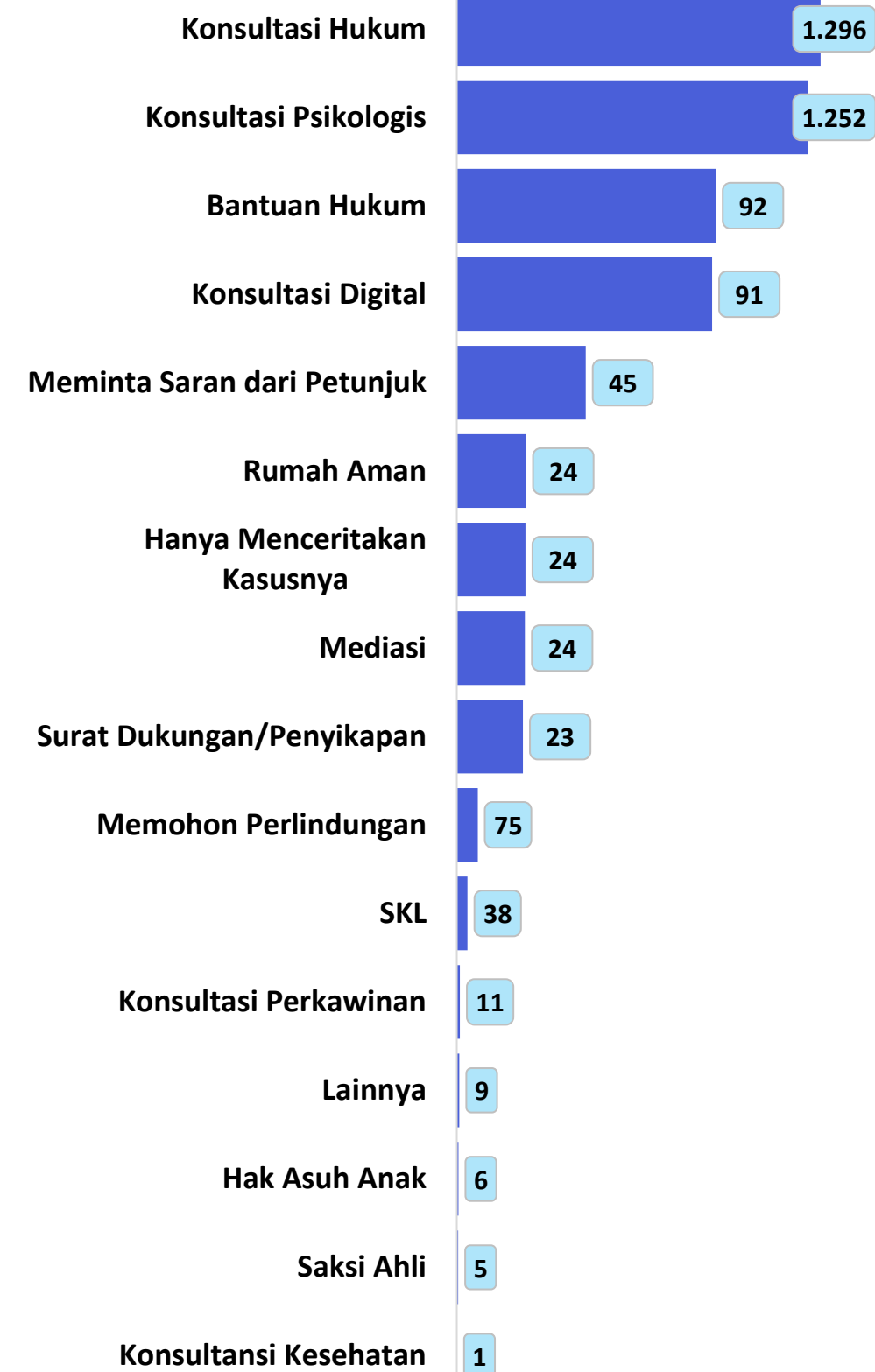
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT JUMLAH LAYANAN YANG DITERIMA, PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023



Sumber : Simfoni PPA (KemenPPPA)



Sumber : Titian Perempuan (FPL)



Sumber : Sintaspuan (KP)

Layanan yang paling banyak diterima oleh korban yaitu :

SIMFONI PPA



PENGADUAN



KESEHATAN

SINTASPUAN DAN TITIAN PEREMPUAN



KONSULTASI HUKUM

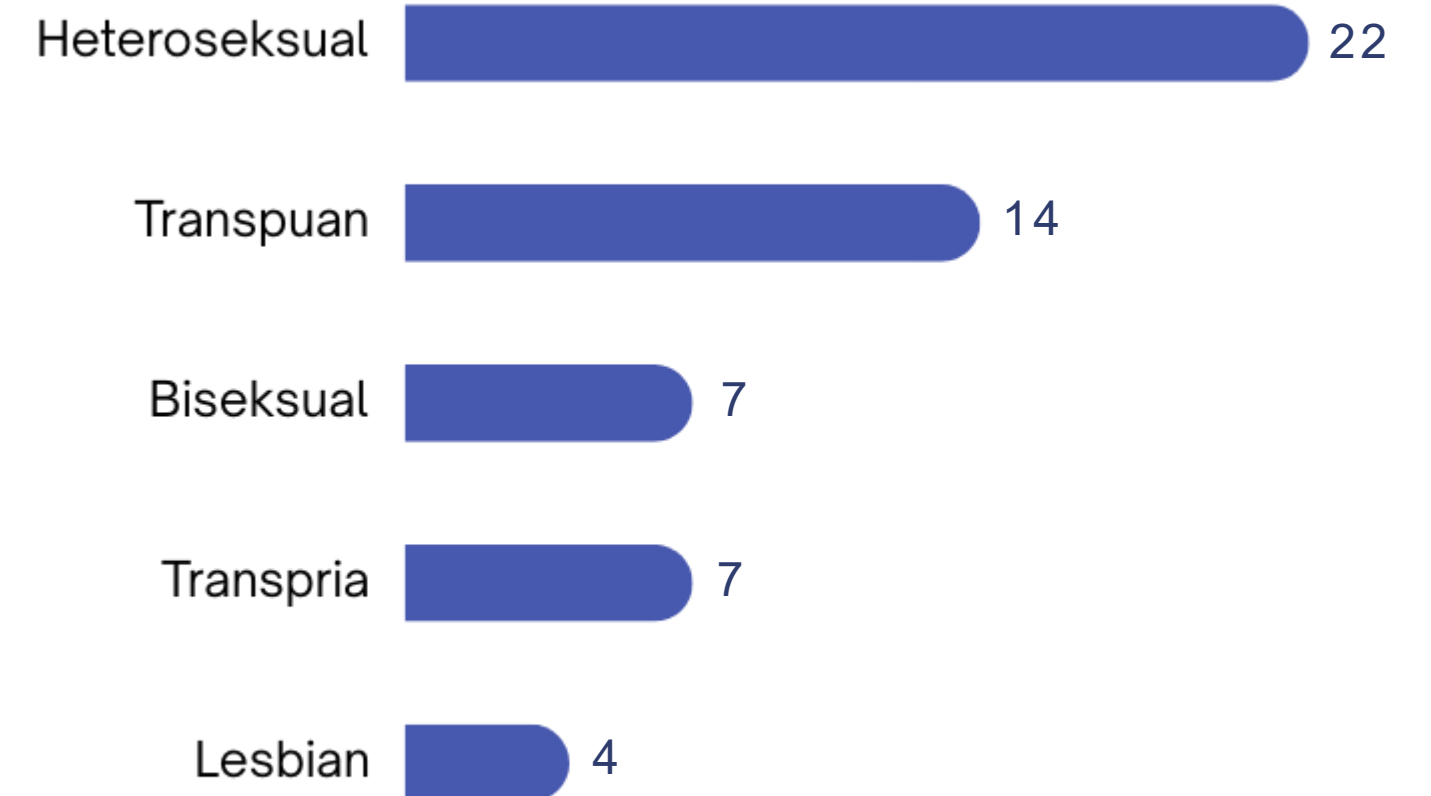
Satu korban dapat menerima beberapa layanan tergantung kebutuhan.

Perempuan Korban dengan HIV

- Berdasarkan data pada **Titian Perempuan**, terdapat 75 perempuan (1,8%) positif HIV/AIDS melaporkan kekerasan yang dialami
- Status positif tersebut menambah kerentanan pada kekerasan dan semakin sulitnya memperoleh keadilan dan pemenuhan hak
- Korban enggan untuk berani melaporkan kasus Kekerasan yang dialaminya karena kekhawatiran status kesehatannya diketahui banyak orang dan memperoleh kerentanan berikutnya yaitu diskriminasi.

Perempuan Korban dengan **KERAGAMAN GENDER DAN SEKSUALITAS**

Korban dengan Keragaman Gender dan Seksualitas Periode Januari - Desember 2023



Sumber : Titian Perempuan dan Sintas Puan

Kesimpulan

JANUARI - DESEMBER 2023

KtP 34.682

Melapor dan ditangani

Meningkat **1.995** korban dibandingkan tahun 2022.

Simfoni PPA
26.161 korban

Sintaspuan KP
3.303 korban

Titian Perempuan FPL
5.218 korban

JAWA BARAT

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

DKI JAKARTA

korban **KtP tertinggi**

Simfoni PPA

Jabar, Jatim, Jateng, Sumut

Sintaspuan KP

Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim

Titian Perempuan FPL

DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Bengkulu

USIA 0-17 TH → 49,92 %

korban **KtP tertinggi**

USIA >60 TH → 1,44 %

korban **KtP terendah**

Simfoni PPA

0-17 tahun → KtP tertinggi

Sintaspuan KP

Titian Perempuan FPL

18 - 40 tahun → KtP tertinggi

18-40 tahun → Peralihan usia remaja dan dewasa

SMA 31,50%

korban **KtP tertinggi**

SMP 19,85%

korban **KtP tertinggi ke-2**

Kesimpulan

PELAJAR 38,38%

korban KtP tertinggi

selaras dengan korban kekerasan berdasarkan kelompok umur dimana tertinggi pada umur 0-17 thn

PELAJAR Simfoni PPA
Sintaspuan KP

Titian Perempuan FPL
Ibu Rumah Tangga

FPL lebih menekankan untuk menjangkau korban di desa-desa yang sebagian besar IRT.

BELUM KAWIN

55,58% korban KtP tertinggi

BELUM KAWIN Simfoni PPA
Sintaspuan KP

Titian Perempuan FPL

KAWIN TERCATAT

DISABILITAS

DKI JAKARTA 83 korban

DIY 65 korban

JAWA BARAT 53 korban

Sintaspuan KP
Titian Perempuan FPL

Disabilitas

Mental → 83 korban
Sensorik → 30 korban
Intelektual → 29 korban
Fisik → 14 korban
Rungu → 2 korban

Simfoni PPA

Kekerasan Seksual tertinggi ke-1

Kekerasan Fisik tertinggi ke-2

Kekerasan Psikis tertinggi ke-3

Sintaspuan KP
Titian Perempuan FPL

Kekerasan Psikis tertinggi ke-1

Kesimpulan

PELAKU < KORBAN
26.859 34.682

1 pelaku kekerasan dapat
melakukan kekerasan
terhadap lebih dari **1 korban**

PELAKU

18 - 40 Th

SMA

Bekerja

SUAMI Hubungan pelaku
& korban tertinggi

Simfoni PPA 4.668 kasus

Sintaspuan KP 674 kasus

Titian Perempuan 931 kasus

Budaya patriarki masih kuat diterapkan dlm masyarakat, yang menempatkan istri sebagai subordinasi suami.

Ketergantungan istri pada suami, baik secara fisik, emosional, maupun finansial masih sangat kuat, yang semakin memperburuk situasi kekerasan dlm rumah tangga.

**Bentuk Layanan
Tertinggi**

SIMFONI PPA

Layanan pengaduan
Layanan Kesehatan

SINTASPUAN KP

Konsultasi Hukum

TITIAN PEREMPUAN

Konsultasi Hukum

KBGO

Kekerasan Berbasis
Gender Online.

SINTASPUAN KP 447 korban

Dilakukan oleh teman di **media sosial**, termasuk ancaman siber (**cyber threats**), pemerasan (**sextortion/extortion**), serta berbagai bentuk KBGO lainnya

Peningkatan interaksi masyarakat dengan platform digital tidak diimbangi oleh literasi penggunaan platform digital yg aman

Kurangnya pemahaman & kesadaran ttg keamanan digital membuat banyak perempuan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi online.

Perlu edukasi yg lebih baik & perlindungan yg lebih efektif di ranah digital untuk mengurangi insiden KBGO

Kesimpulan

KELOMPOK RENTAN

Tidak terbatas pada disabilitas, tetapi juga perempuan korban HIV dan keberagaman gender

menjadi kelompok yg memang secara data tidak cukup tinggi

Bukan karena memang angka kasus yang sedikit,

melainkan

Minimnya akses, serta pemahaman lembaga penyedia layanan yang terbatas serta pandangan masyarakat yang masih tertutup pada isu-isu tsb.

TANTANGAN

Masih adanya perbedaan beberapa kategori dalam instrumen yang digunakan di masing-masing lembaga.

Sinergisitas data

kekerasan terhadap perempuan periode Januari-Desember 2023, telah dilakukan penggabungan beberapa **karakteristik**

antara 3 lembaga, yaitu perempuan korban menurut :

- Kelompok umur
- Pendidikan
- Status perkawinan
- Status disabilitas
- Kegiatan utama (pekerjaan)
- Jenis atau bentuk kekerasan.

Kebijakan satu data

terkait kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan dan Perempuan Dewasa memerlukan sinergisitas antar lembaga baik dlm sisi infrastruktur data, anggaran, serta sumber daya manusia.

Pemerintah Pusat & Daerah

Berkomitmen dalam **koordinasi** penanganan & pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan

Dengan memastikan **dukungan alokasi dana khusus** untuk pengembangan & pengelolaan sistem pendataan kasus kekerasan melibatkan lembaga layanan berbasis masyarakat. Komitmen ini akan berdampak positif pada **perwujudan sistem peradilan pidana terpadu** berbasis elektronik dan pengembangan Satu Data Indonesia

Memastikan

Implementasi turunan **UU No.12 Th 2022** "Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dilakukan".

Beberapa peraturan turunan yang sudah disahkan :

1. **Perpres No.9/2024** "Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. **Perpres No.55/2024** "Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan & Anak (UPTD PPA)
3. **PP No.27/2024** "Koordinasi & Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan & Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"

Mendorong

Pemerintah Daerah segera menyusun kebijakan turunan di masing-masing wilayah terkait UU TPKS.

Memastikan ketersediaan sarana & prasarana serta anggaran guna berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi pemenuhan perempuan korban kekerasan termasuk **memastikan** semua wilayah terbentuk UPTD PPA.

Pemerintah Pusat, Daerah, Institusi Pendidikan termasuk Institusi Pendidikan di satuan Kementerian Agama

Memastikan Implementasi

1. **Permendikbud No.30/2021** "Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan"
2. **Permendikbud No.46/2023** "Pencegahan & Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan, serta Peraturan Menteri Agama No.73/2022 "Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama"

Rekomendasi

Kementerian Agama

Memiliki peran penting dlm menguatkan materi “kesetaraan gender dalam pendidikan calon pengantin/ kursus calon pengantin (suscatin)” mengingat angka kekerasan tertinggi terjadi pada ranah privat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Mendorong Kementerian Agama melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan calon pengantin, khususnya materi kesetaraan gender termasuk melakukan monitoring pencegahan perkawinan anak

Menguatkan koordinasi antar K/L untuk memastikan adanya Perpres “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPTPKKTP)” & Perpres “Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan”.

Mendorong negara dalam percepatan pembentukan Direktorat PPA PPO untuk meningkatkan & menguatkan kualitas proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada proses hukum, khususnya ditingkat kepolisian, Seiring dengan meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merumuskan & menerapkan mekanisme penanganan perempuan berhadapan dg hukum (PBH).

Pengaturan yg komprehensif akan memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan memperhatikan aspek gender serta trauma yang mungkin mereka alami.

Mendorong implementasi Perpres No.5/2024 “Pendidikan & Latihan bagi aparat penegak hukum, Tenaga layanan Pemerintah, Tenaga Layanan Berbasis Masyarakat, & Tenaga layanan pendukung untuk mendapatkan peningkatan kapasitas yang berperspektif HAM & gender dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Mendorong Kejaksaan Agung

Meningkatkan koordinasi

lintas aparat penegak hukum, khususnya dalam rangka penanganan kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan asas non-diskriminasi serta aspek hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU No.12/2022 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual" guna keberhasilan penanganan perkara pidana untuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Mendorong Mahkamah Agung

Menerapkan & mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung No.3/2017 "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum"

Perempuan kelompok rentan:

- Perempuan dg disabilitas
- Perempuan lansia
- Anak perempuan korban kekerasan

Harus menjadi **subjek prioritas** dalam **kebijakan** maupun program pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah

1. Melakukan peningkatan kapasitas terhadap jaksa/penuntut umum → Pedoman Kejaksaan No.1/2021 dan UU No.12/2022 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual"
2. Memberikan penilaian prestasi & angka kredit bagi jaksa/ penuntut umum yg mengimplementasikan Pedoman Kejaksaan 1/2021
3. Melakukan pengawasan serta evaluasi berkala terkait pengimplementasian Pedoman Kejaksaan 1/2021
4. Menyusun & mengesahkan aturan internal terkait larangan bagi jaksa/penuntut umum melakukan kekerasan seksual disertai pemberian sanksi yg tegas dg didasarkan pada UU No.12/2022 "Tindak Pidana Kekerasan Seksual"

Mendorong Pemerintah

Mengembangkan program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan informasi, bantuan hukum dan konseling, serta layanan kesehatan yang berkualitas & berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan hak korban.

Menguatkan Jaringan

penanganan di daerah dan lembaga penyedia layanan lainnya yang menjadi jembatan bagi penanganan kekerasan seperti

- Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- Bina Keluarga Remaja (BKR)
- Layanan Sahabat Perempuan, Anak (SAPA) 129
- Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

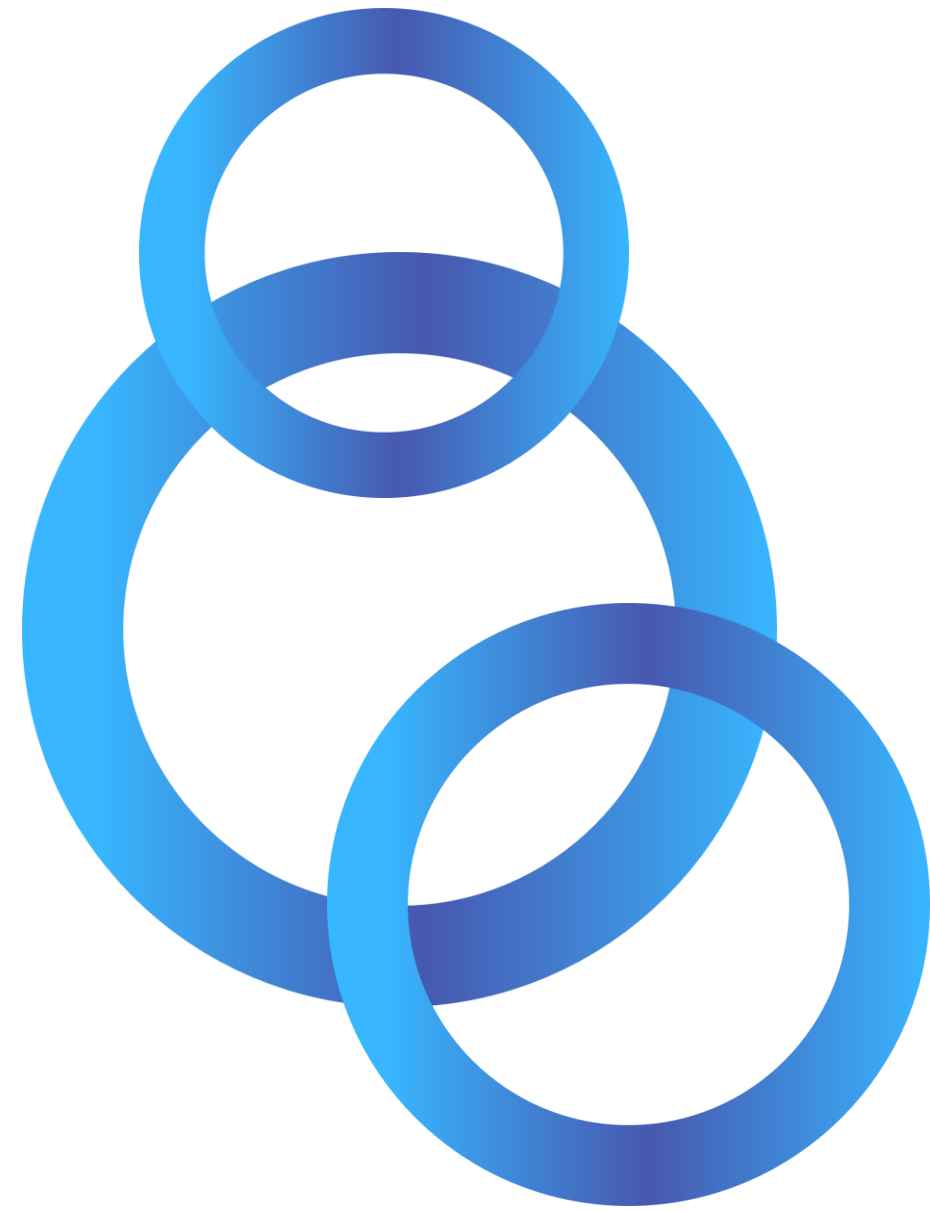
Mendorong Kajian lebih lanjut

tentang kondisi lansia, HIV/AIDS, Keberagaman gender & juga kelompok rentan lainnya baik sebagai korban kekerasan maupun kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan dalam mendorong strategi pencegahan & penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Mendorong layanan yang inklusif pada tingkat pengada layanan di daerah, **lembaga terkait** (Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan LPSK), aparat penegak hukum, dan pemerintah.

Mengajak para pihak

Memperbanyak **ruang penyelenggaraan/pemberian informasi** melalui kampanye, pemanfaatan media sosial, atau melalui kader-kader seperti kader PKK, Satgas PPA, kader kesehatan (petugas posyandu) termasuk program penguatan dukungan gerakan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diharapkan mampu mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.



Thank You
